

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**



SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah. Kinerja Sekretariat Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Sumenep, Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP

Ir. EDY BASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	15
D. Landasan Hukum	28
E. Sistematika	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
A. Rencana Strategis	32
B. Rencana Kerja Tahun 2023	36
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	45
D. Pohon Kinerja Tahun 2023	56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	69
A. Capaian Kinerja Organisasi	64
B. Realisasi Anggaran	100
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	103
BAB IV PENUTUP	110
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	113
MATRIKS RENSTRA	117
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	124
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	128

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKijP). Penyusunan LKiJP Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah diwadahi dalam Peraturan Daerah Nomer 15 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, susunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
 1. Bagian Perekonomian dan SDA;

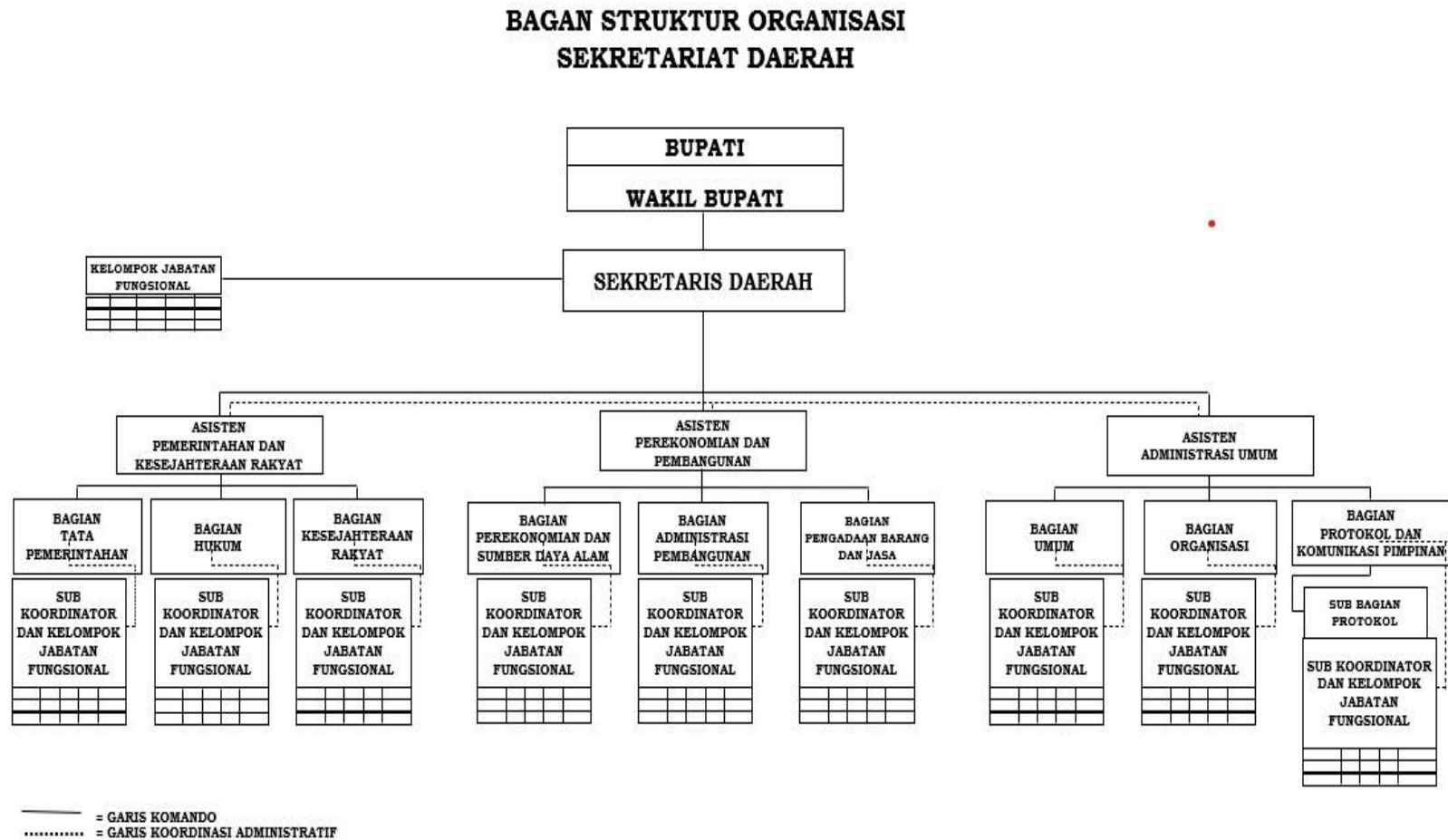
2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif pimpinan dan pembinaan aparatur sipil negara kabupaten; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Sekretaris Daerah sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Para Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian / Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Sumenep

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi

di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah.

Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Hukum melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya melaksanakan tugas pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi perekonomian dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi perekonomian, dan sumber daya alam;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi perekonomian, sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Umum melaksanakan tugas penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Organisasi melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan tugas persiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

- a. persiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. persiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. persiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Protokol melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan

ketentuan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/ ketrampilannya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Subkoordinator ditetapkan oleh pimpinan tinggi pratama.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat Daerah periode 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.6. Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	<p>Belum terpenuhinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa (PPBJ);</p> <p>Belum terpenuhinya Tingkat kematangan UKPBJ Level 3;</p> <p>Belum terpenuhinya 17 standarisasi LPSE;</p> <p>Perlu upaya berkelanjutan untuk mendorong penggunaan e-procurement oleh seluruh OPD (SPSE, e-tendering, penayangan RUP dll)</p>	<p>Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baikserta penggunaan <i>e-procurement</i> oleh seluruh OPD untuk menunjang implementasi SAKIP dan RB</p>
2	<p>Perlunya upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan Ketepatan waktu dalam penyusunan produk hukum daerah.</p>	<p>Penyelarasan/ harmonisasi produk hukum daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya termasuk aturan tentang pelarangan diskriminasi hukum (menurut hukum HAM internasional)</p>
3	<p>Perlunya publikasi produk hukum daerah agar dapat diakses oleh seluruh pengguna</p> <p>Tiap tahun selalu ada permasalahan hukum yang harus didampingi untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan daerah.</p>	<p>Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui informasi hukum dan Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum</p>
4	<p>Diperlukan pedoman penyusunan kebijakan tentang pelayanan publik dan tata laksana</p> <p>implementasi standar pelayanan publik dan ketatalaksanaan di seluruh OPD bersifat dinamis sesuai perkembangan pelayanan OPD sehingga perlu dimonitoring dan dievaluasi kualitasnya secara berkelanjutan;</p> <p>SDM di OPD memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dan Masih membutuhkan sosialisasi berkelanjutan tentang pentingnya penyusunan dan penggunaan SOP pelayanan publik dan tata laksana;</p> <p>Perlunya pembinaan dan Fasilitasi event kompetisi Inovasi pelayanan Publik</p>	<p>Peningkatan Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik dan Meningkatkan Pemahaman Aparatur terhadap pentingnya kualitas pelayanan publik masing-masing OPD</p>
5	<p>Jangka Waktu yang dibutuhkan panjang dalam penentuan Struktur dan fungsi yang sesuai. Salah satunya harus memperhatikan irisan antara identifikasi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan ketentuan perundangan yang berlaku;</p> <p>Penataan struktur organisasi tidak dapat dipisahkan dari penataan fungsi di dalam struktur organisasi tersebut sehingga diperlukan kajian yang tepat, berkualitas dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi tepat ukuran</p>

No	Permasalahan	Isu Strategis
6	Masih perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi, fasilitasi dan koordinasi terkait dengan proses implementasi SAKIP dan RB; Proses pelaporan seringkali bermasalah dengan dengan batas waktu penyampaian pelaporan sehingga perlu upaya lebih untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas data dari OPD untuk menunjang kualitas data yang akan diolah.	Mendorong Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD, Pengembangan Budaya Kinerja
7	perlu upaya lebih untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas data dari OPD untuk menunjang kualitas data yang akan diolah. Belum semua OPD memahami mekanisme kerjasama daerah, dan peluang kerja sama perlu ditingkatkan; Masih ada kerja sama di OPD yang data dukungnya belum atau tertambat untuk difasilitasi; Perlunya peningkatan administrasi kelurahan; Belum optimalnya pelaksanaan paten; Masih diperlukan update rupa bumi dan patok batas wilayah dan pemeliharannya	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengamanan batas wilayah, dan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan
8	Ketersediaan Data penerima hibah bansos yang akurat serta diperlukan proses Verifikasi untuk memastikan tepat sasaran dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban; Diperlukan inventaris jenis kegiatan keagamaan, kepemudaan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilaksanakan serta diperlukan teknis pelaksanaan kegiatan yang tepat;	Peningkatan fasilitasi pelayanan bidang keagamaan, pendidikan dan kepemudaan serta kesehatan dan kemasyarakatan
9	Perlu pelatihan tenaga protokoler secara berkesinambungan; Kegiatan pimpinan yang melibatkan protokoler sangat banyak. Informasi yang diberitakan oleh media kurang berimbang menuntut fungsi komunikasi pimpinan.	Peningkatan layanan keprotokolan dan Pemberitaan kegiatan Pembangunan Daerah
10.	Data dari OPD terlambat disampaikan, atau data berubah-ubah; terjadi penambahan data berkali-kali selama proses penyusunan Perbup SSH, ASB, SBU dan Juknis; Aturan mengenai pengelolaan keuangan sangat dinamis; Realisasi anggaran OPD tidak sesuai dengan jadwal pada anggaran kas dan/ atau realisasi anggarantidak maksimal; Proyek yang dilaksanakan sangat banyak dan tersebar di kepulauan dan daratan sehingga perlu metode untuk monitoring dan evaluasi.	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan pengendalian Pembangunan Daerah

No	Permasalahan	Isu Strategis
11.	<p>Penentuan UMKM yang parsial atau tidak berkelanjutan efektivitas monitoring dan evaluasi mejadi kurang maksimal;</p> <p>Dibutuhkan koordinasi dengan OPD teknis seperti: Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk tindaklanjut dari pembinaan;</p> <p>pemahaman SDM Perekonomian mengenai aturan yang berlaku terkait pembinaan UMKM perlu terus ditingkatkan;</p> <p>UMKM belum bisa mengakses/ kerja sama dengan perbankan;</p> <p>Setting/ model pembinaan di tengah kondisi yang tidak menentu (pandemi) seringkali menjadi hambatan pelaksanaan</p>	Peningkatan Ekonomi Rakyat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
12.	Kinerja BUMD yang belum optimal;	Pengembangan Usaha Daerah dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan BUMD
13.	Data perekonomian daerah sifatnya terus berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat baik karena situasi nasional maupun global.	Ketersediaan data dalam rangka Pengendalian Ekonomi Daerah
14.	Penyerapan anggaran DBHCHT masih kurang dari 90%	Pengoordinasikan penggunaan dan pelaporan DBHCHT
15.	SDA Kab. Sumenep berlimbah terutama tambang dan hasil lainnya sehingga data penggunaan lahan dan proses yang terjadi harus dapat digambarkan dan dilaporkan dengan kualitas yang baik sehingga kebijakan dapat diambil dengan tepat.	Peningkatkan pemahaman dan pengelolaan bidang energi dan sumber daya alam
16.	<p>Setda terdiri dari 9 Bagian sehingga input dan ouput perencanaan harus selaras;</p> <p>Dokumen perencanaan di atasnya tidak sepenuhnya digunakan saat menyusun anggaran tiap tahun sehingga harus dimonitoring;</p> <p>Transaksi pengelolaan keuangan sangat besar tiap tahunnya. keseluruhan anggaran yang dikelola hampir 45 milyar lebih. Struktur pengelola keuangan yang besar (di 9 Bagian)</p> <p>Labelisasi belum menyentuh seluruh aset; proses penghapusan barang yang kurang optimal; komitmen pengurus barang; lokasi barang ada di 5 titik yang letaknya tidak berdekatan yaitu Rumdis Bupati, Rumdis Wakil Bupati, Rumdis Sekda, Kantor Bupati dan kawasan perkantoran terpadu serta Pendopo</p> <p>Belum didukung pengelolaan Arsip yang baik</p>	Peningkatkan Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik serta penggunaan *e-procurement* oleh seluruh OPD;
2. Penyelarasan/harmonisasi produk hukum daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya termasuk aturan tentang pelarangan diskriminasi hukum (menurut hukum HAM internasional);
3. Peningkatan kualitas referensi hukum (publikasi), layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum;
4. Mendorong Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi tepat ukuran;
6. Peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, Pengembangan Budaya Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
7. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, pengamanan batas wilayah, dan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan;
8. Pelaksanaan Kegiatan keagamaan, pendidikan dan kepemudaaan, kesehatan dan kemasyarakatan;
9. Peningkatan layanan keprotokolan dan pemberitaan kegiatan pembangunan daerah;
10. Mendorong peningkatan Ekonomi Rakyat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
11. Pembinaan kepada BUMD untuk mendorong terciptanya kinerja yang lebih baik;
12. Peningkatan Pengendalian Ekonomi Daerah;
13. Peningkatan Penyelenggaraan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian nilai SAKIP Sekretariat Daerah.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik serta penggunaan <i>e-procurement</i> oleh seluruh OPD	<p>1 Optimalisasi Penggunaan sistem informasi (Aplikasi) dalam proses pengadaan barang dan jasa</p> <p>2 Penguatan Dukungan Manajerial di Lingkungan Setda untuk pelaksanaan <i>e-procurement</i> (monitoring dan evaluasi)</p> <p>3 Peningkatan SDM yang memiliki keahlian Pengadaan Barang dan Jasa dan mengupayakan terisinya Japfung</p> <p>4 Optimalisasi pemrosesan e-tendering dan e-purchasing sesuai standar pelayanan</p> <p>5 Optimalisasi advokasi dan konsultasi PBJ serta Penanganan pengaduan dan snggah</p> <p>6 Publikasi terhadap perubahan aturan dalam pengadaan barang dan jasa kepada SDM PBJ dan seluruh OPD</p> <p>7 Penyusunan Kebijakan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</p>
			Menyelaraskan/harmonisasi produk hukum daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya termasuk aturan tentang pelarangan diskriminasi hukum (menurut hukum HAM internasional)	<p>1 Optimalisasi aplikasi Refensi hukum;</p> <p>2 Peningkatan kualitas SDM legal drafting;</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kualitas referensi hukum (publikasi), layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	1 Optimalisasi pengelolaan SJDIH dan peningkatan kinerja operator SJDIH untuk mengupdate informasi mengenai produk hukum yang diterbitkan
				2 Penggunaan aplikasi dalam proses penerbitan produk hukum
				3 Optimalisasi kerja sama dengan kuasa hukum untuk penyelesaian kasus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
				4 Peningkatan koordinasi dengan APH terkait isu-isu hukum terkini
				5 Optimalisasi Layanan Konsultasi hukum dalam lingkup pemerintah Kabupaten Sumenep
			Mendorong Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	1 Penyusunan Kebijakan pelayanan publik dan tata laksana;
				2 Optimalisasi pendampingan implementasi standar pelayanan publik dan tata laksana
				3 Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				4 Fasilitasi dan pembinaan OPD yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi tepat ukuran	1 Penyusunan Perda Perangkat Daerah dan Perbup Tugas dan Fungsi
				2 Penyusunan kebutuhan pegawai, formasi jabatan, kompetensi jabatan, kelas nilai jabatan
				3 Optimalisasi Rakor Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
				4 Perumusan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
				5 Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan;
				6 Penguatan Monitoring dan evaluasi Tugas dan Fungsi
			Meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, Pengembangan Budaya Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja kepala OPD dengan bupati, Menodorong Peningkatan implementasi SAKIP, budaya kerja dan peningkatan RB
				2 Optimalisasi pegumpulan dokumen bahan evaluasi SAKIP Kabupaten (data input dari seluruh OPD didukung oleh buki yang valid dan tepat waktu)
				3 Optimalisasi koordinasi dengan OPD
				4 Pemberian reward kepada OPD untuk pelaksanaan SAKIP, RB dan Budaya Kerja OPD;

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Menyelenggarakan administrasi pemerintahan daerah, pengamanan batas wilayah, dan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan	1 Penataan administrasi pemerintahan dan Pelaksanaan Otonomi dengan memanfaatkan sistem informasi
				2 Optimalisasi pengumpulan dokumen bahan evaluasi EKPPD Kabupaten (data input dari seluruh OPD didukung oleh bukti yang valid dan tepat waktu) dan sosialisasi berkesinambungan
				3 Pendampingan pengelolaan anggaran di Kelurahan
				4 Optimalisasi pelaksanaan PATEN
				5 Pelaksanaan pembanguna, pemeliharaan Patok batas, penamaan Rupabumi dan pembuatan papan nama jalan
			Melaksanakan Kegiatan keagamaan, pendidikan dan kepemudaan, kesehatan dan kemasyarakatan	1 Mapping, mendesain dan melaksanakan Kegiatan Keagamaan
				2 Peningkatan kualitas data Penerima (<i>by name by address</i>) Bantuan Lembaga Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dan peningkatan kualitas administrasi pertanggungjawaban
				3 Optimalisasi Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dilakukan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan layanan keprotokolan dan pemberitaan kegiatan pembangunan daerah	1 Peningkatan fasilitasi komunikasi pimpinan dan peningkatan kualitas layanan keprotokolan
				2 Optimalisasi dokumentasi dan publikasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan
			Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan ASB, SSH, SBU, Juknis dll
				2 Optimalisasi evaluasi kinerja OPD melalui pelaksanaan TEPR
				3 Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pembangunan dengan melakukan monitoring pada proyek yang strategis di wilayah kepulauan dan daratan
			Mendorong peningkatan Ekonomi Rakyat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	1 Optimalisasi Monitoring dan evaluasi pada Pelaku Ekonomi Mikro (Pembinaan UMKM);
				2 Menggordinasi OPD teknis untuk pendampingan keada UMKM;
				3 Membantu sosialisasi produk pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM;
			Melakukan pembinaan kepada BUMD untuk mendorong terciptanya kinerja yang lebih baik	1 Optimalisasi fasilitasi pengelolaan BUMD;
				2 Monitoring dan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan dan rencana kerja perusahaan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan Pengendalian Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Optimalisasi fasilitasi pelaporan Pengguna Dana Pajak Rokok dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok; 2 Penyediaan data TPID yang berkualitas; 3 Peningkatan pemahaman tentang Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan
			Meningkatkan Penyelenggaraan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian nilai SAKIP Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Optimalisasi penggunaan sistem informasi untuk administrasi keuangan, aset dan kepegawaian 3 Peningkatan kapasitas SDM 4 Peningkatan Upaya pemenuhan ebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemda termasuk kerumahtanggan KDH/WKDH 5 Peningkatan proses penataan arsip

Untuk realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun terakhir sesuai dengan tugas Sekretariat Daerah untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif pimpinan. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah a) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; b) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; d) pelayanan administratif pimpinan dan pembinaan aparatur sipil negara kabupaten; dan e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Di dalam kerangka tugas dan fungsi tersebut indikator kinerja utama Sekretariat Daerah melaksanakan Misi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, maka disusun dan ditetapkan sesuai SK Penetapan IKU Sekretariat Daerah Nomor: 188/14/ KEP/ 435.031/ 2022 tanggal 1 Maret 2022 sesuai tabel berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
(IKU Eselon II) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun 2022**

Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kaulitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	75	43,9	1. Indikator Pemanfaatan SIRUP Bobot 10%, e- tendering 20% 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 30%; 3. Tingkat Kematangan UKPBJ 40%	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia (LKPP)
			Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan	100%	100%	(Jumlah Peraturan Daerah yang telah direviu : Jumlah usulan dari OPD) x 100 %	Bagian Hukum
			Indeks kepatuhan layanan public	70,60	65,54	Indeks kepatuhan layanan	Ombudsman RI
			Indeks Kelembagaan	77	75	Indeks kelembagaan	Kemenpan RB
			Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB	100%	100%	(Jumlah OPD yang difasilitasi : Jumlah OPD seluruhnya) x 100%	Bagian Organisasi
			Nilai EKPPD	4,2	2,80	Skor dari penilaian EKPPD	Kemendagri
			Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	100%	100%	Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	Bagian Kesejahteraan Rakyat

			Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolanan	80%	80%	Hasil survey kepuasan layanan Keprotokolanan	Bagian protokol dan komunikasi Pimpinan
			Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	100%	100%	(Kebijakan Bidang Pembangunan yang telah disusun : Kebijakan Bidang Pembangunan yang seharusnya disusun) x 100%	Bagian Pembangunan
			Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	100%	100%	(Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan : Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA berlaku) x 100%	Bagian Perekonomian dan SDA
			Nilai Sakip setda	A	A	Hasil Evaluasi SAKIP Setda	Inspektorat

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 63).

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.**
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Sekretariat Daerah** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 3 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani

Masyarakat. Sedangkan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diintervensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, Inovatif dan Responsif dalam melayani Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai Bobot SAKIP Kabupaten

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diintervensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator

dan target kinerja dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Th. 2021	2022	Target Capaian Kinerja 2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Th. 2026	
1.	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai Bobot Pelaporan SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD	Nilai	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6	
				Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
				% Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
				Nilai Sakip Setda	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A
				Indeks Kelembagaan	Nilai	76	77	78	79	80	81	81	
				% PD yang difasilitasi pelaksanaan SAKIP dan RB	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
				Indeks kepatuhan layanan publik	Nilai	70,25	70,60	70,95	80,3	80,65	81	81	
				Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	Persentase	80	80	80	80	80	80	80	
				% Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
				% Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	75	75	75	75	75	75	75					

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kaulitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	75	1. Indikator Pemanfaatan SIRUP Bobot 10%, e- tendering 20% 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 30%; 3. Tingkat Kematangan UKPBJ 40%	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia (LKPP)
			Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan	100%	(Jumlah Peraturan Daerah yang telah direviu : Jumlah usulan dari OPD) x 100 %	Bagian Hukum
			Indeks kepatuhan layanan publik	70,95	Indeks kepatuhan layanan	Ombudsman RI
			Indeks Kelembagaan	78	Indeks kelembagaan	Kemenpan RB
			Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB	100%	(Jumlah OPD yang difasilitasi : Jumlah OPD seluruhnya) x 100%	Bagian Organisasi
			Nilai EKPPD	4,3	Skor dari penilaian EKPPD	Kemendagri
			Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	100%	Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80%	Hasil survey kepuasan layanan Keprotokolan	Bagian protokol dan komunikasi Pimpinan
			Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	100%	(Kebijakan Bidang Pembangunan yang telah disusun : Kebijakan Bidang Pembangunan yang seharusnya disusun) x 100%	Bagian Pembangunan
			Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	100%	(Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan : Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA berlaku) x 100%	Bagian Perekonomian dan SDA
			Nilai Sakip setda	A	Hasil Evaluasi SAKIP Setda	Inspektorat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kaulitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan	%	97%
			Persentase kerjasama Daerah yang difasilitasi	%	100%
			Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah	%	100%
			Persentase Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	%	100%
			Persentase Laporan PPD Kabupaten tepat waktu	%	100%
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	3
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	7
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	4			
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan keagamaan, Pendidikan, dan Kepemudaan, Kesehatan dan Kemasyarakatan	%	100 %	

		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	13
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	4
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	3
		Persentase Pendampingan hukum dan penyusunan produk hukum yang terselesaikan	%	100 %
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	699
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Dokumen	5
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	699
		Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	Dokumen	21
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	21
2		Persentase Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah	%	100%

		Persentase Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	%	100%
		Persentase perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan	%	100%
		Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan	%	100%
		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah	%	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	5
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	10
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4
		Persentase kebijakan dan data pembangunan yang disediakan	%	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	3
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	21
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4
		Persentase Penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	%	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	75

			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	2
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	5
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	%	100%
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1
			Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	%	100%
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi	%	100%
3			Persentase OPD yang menindaklanjuti Monev. peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja	%	100%

		Persentase OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana	%	100%
		Persentase Layanan Keprotokolan yang terpenuhi	%	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	%	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2

		Persentase layanan administrasi Keuangan Setda yang dipenuhi	%	100%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	210
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1
		Persentase layanan administrasi BMD setda yang dipenuhi	%	100%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2

		Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	%	100%
		Jumlah paket pengadaan pakaian dinas ASN	Paket	1
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	7
		Persentase layanan administrasi Umum yang dipenuhi	%	100%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	321
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	600
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4500
		Persentase Pengadaan BMD Penunjang Setda yang dilaksanakan	%	100%
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	26

		Persentase Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	%	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
		Persentase BMD penunjang urusan Pemda yang dipelihara	%	100%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	135
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	8
		Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	%	100%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	4

		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2
		Persentase Kerumahtangaan Setda yang difasilitasi	%	100%
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	3
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	9
		Persentase penataan organisasi (OPD) yang dilaksanakan	%	100%
		Persentase OPD yang difasilitasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	%	100%
		Persentase OPD yang mengikuti KIPP	%	100%
		Persentase OPD yang dimonev kepatuhan terhadap SPP	%	100%
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	180
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	14
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	14
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	55
		Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	%	100%
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12

		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	14
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12

Sumber : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target		Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas Kesesuaian Peleporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah	1. Nilai EKPPD	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan	4,3	4,3	Rp 855.076.964	Rp 10.246.497.102
		2. %Kebijakan Bidang Kesra yang terpenuhi		% Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	100	100		
		3. Nilai penataan Peraturan Perundang-undangan		% Harmonisasi Produk Hukum Daerah	100	100		
		4. % Kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang terpenuhi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	% Fasilitas binaan dan pengendalian perekonomian daerah	100	100	Rp 4.908.388.765	Rp 1.828.476.065
		5. % Kebijakan bidang pembangunan yang terpenuhi		% perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan	100	100		
		6. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa		Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan	75	75		
		7. Nilai SAKIP SETDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	A	A	Rp 38.999.062.640	Rp 41.392.834.553
		8. Indeks Kelembagaan		% OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana	78	78		
		9. Persentase PD yang difasilitasi SAKIP dan RB		% OPD yang meniadakanj uti Monev. peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja	100	100		
		10. Indeks Kepatuhan Layanan Publik		% Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi	70,95	70,95		
		11. Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan		% Layanan Keprotokolan yang terpenuhi	80	80		

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Sekretariat Daerah :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Sebelum dan Sesudah
Perubahan Tahun 2023

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan	97	97	1.269.215.820	1.269.212.020
	Administrasi Tata Pemerintahan	% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan	97	97	1.202.209.620	1.205.840.820
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	3	146.476.900	175.092.100
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7	7	360.624.020	360.624.020
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	4	695.108.700	670.124.700
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	% Kerjasama Daerah yang difasilitasi	100	100	67.006.200	63.371.200
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	21	21	67.006.200	63.371.200
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	% Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	100	100	6.557.219.354	8.303.003.442
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	% Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	100	100	6.557.219.354	8.303.003.442
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13	13	5.828.011.750	7.283.135.540

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4	4	192.375.800	284.512.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	3	536.831.804	735.355.902
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	% Harmonisasi Produk Hukum Daerah	100	100	724.281.790	674.281.640
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	% Harmonisasi Produk Hukum Daerah	100	100	724.281.790	674.281.640
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	699	699	299.845.610	299.843.460
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5	5	334.867.560	310.069.560
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	699	699	89.568.620	64.368.620
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	% Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah	100	100	2.714.199.040	714.199.040
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	% Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah	100	100	2.470.239.900	470.239.900

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5	5	246.640.000	246.640.000
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10	10	2.089.397.900	107.737.900
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	4	134.202.000	115.862.000
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	% Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	100	100	243.959.140	243.959.140
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Sumber Daya Alam	1	1	80.409.340	80.409.340
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	1	80.639.900	80.639.900
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	1	82.909.900	82.909.900
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	% perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan	100	100	1.929.876.825	849.964.125
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	% perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan	100	100	1.929.876.825	849.964.125

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3	3	603.895.800	563.159.800
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	21	21	1.243.542.125	204.365.425
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	4	82.438.900	82.438.900
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan	100	100	264.312.900	264.312.900
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan	100	100	264.312.900	264.312.900
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	75	75	119.590.000	119.590.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	2	53.008.900	53.008.900
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5	5	91.714.000	91.714.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100	100	37.453.828.729	39.865.211.502
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100	100	26.643.800	26.643.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	5.455.600	5.455.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	4.198.700	4.198.700

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	3.926.000	3.926.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	4.699.500	4.699.500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	2.495.000	2.495.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	4.179.500	4.179.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	1.689.500	1.689.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100	100	21.700.174.930	21.809.700.508
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	210	21.662.828.330	21.754.631.808
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	-	17.610.500
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	7.206.000	7.206.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	11.663.300	11.663.300

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	3.918.300	3.918.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, dan Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	9.496.300	9.496.300
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Mulai Januari sampai Desember	1	1	5.062.700	5.174.300
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100	100	123.348.900	123.348.900
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	12.003.300	12.003.300
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	99.356.000	99.356.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	11.989.600	11.989.600
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100	100	188.041.875	198.190.500
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	1	106.534.875	190.333.500
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7	7	81.507.000	7.857.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100	100	3.744.484.100	4.524.240.020
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	283.800.000	233.600.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	11	1.012.060.600	1.087.015.020
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	381.058.500	314.605.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	321	321	78.452.000	88.452.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	600	1.938.313.000	2.756.869.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4500	4500	50.800.000	43.699.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100	100	255.755.855	699.424.334
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26	26	255.755.855	699.424.334
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100	100	4.111.091.203	4.189.374.953
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	1.323.928.670	1.479.502.910
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.787.162.533	2.709.872.043

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100	100	2.845.595.097	3.224.658.318
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	502.800.000	502.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	42	1.086.489.550	965.529.550
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135	135	155.350.000	209.340.000
	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	8	1.100.955.547	1.546.988.768
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100	100	1.145.327.689	1.095.327.689
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	342.327.689	342.327.689
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	153.000.000	153.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	4	50.000.000	-
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	600.000.000	600.000.000

	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	100	100	3.313.365.280	3.974.302.480
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4	4	332.130.680	580.508.280
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3	3	190.526.800	210.580.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	9	9	2.790.707.800	3.183.214.200
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana	100	100	740.695.611	740.695.251
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% OPD yang menindaklanjuti Monev. peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja	100	100	740.695.611	740.695.251
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi	100	100	740.695.611	740.695.251
	Penataan Organisasi	% OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana	100	100	740.695.611	740.695.251
		% OPD yang menindaklanjuti Monev. peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja	100	100	740.695.611	740.695.251
		% Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi	100	100	740.695.611	740.695.251
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	180	180	261.537.544	275.302.384
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14	14	279.284.187	300.496.887
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	14	14	150.047.480	115.069.580

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	55	55	49.826.400	49.826.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Layanan Keprotokolan yang terpenuhi	100	100	786.927.800	786.927.800
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	% Layanan Keprotokolan yang terpenuhi	100	100	786.927.800	786.927.800
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	12	226.940.900	226.940.900
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	14	14	372.077.900	372.077.900
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	12	187.909.000	187.909.000

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

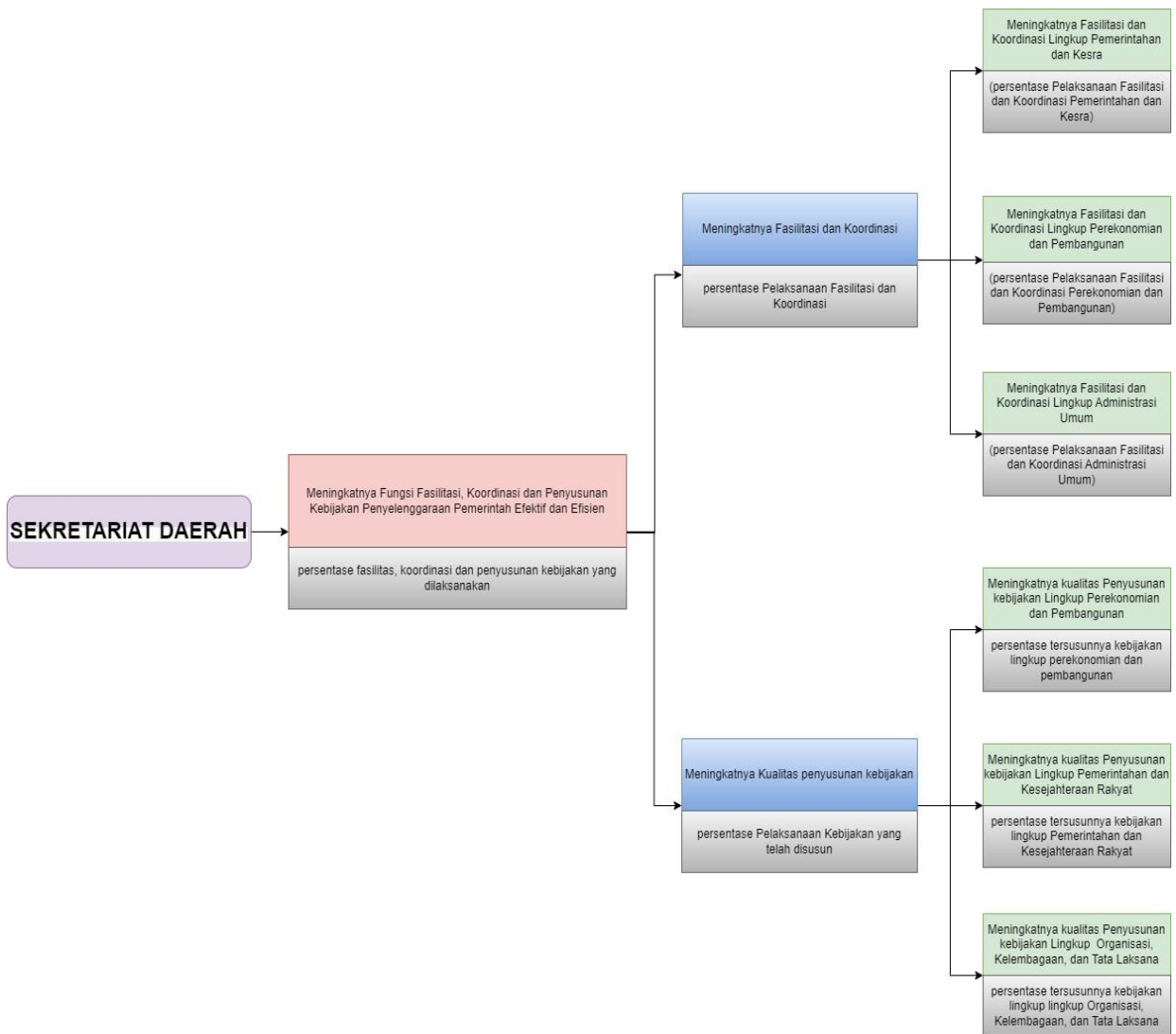
D. Pohon Kinerja Tahun 2023

Pohon Kinerja merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

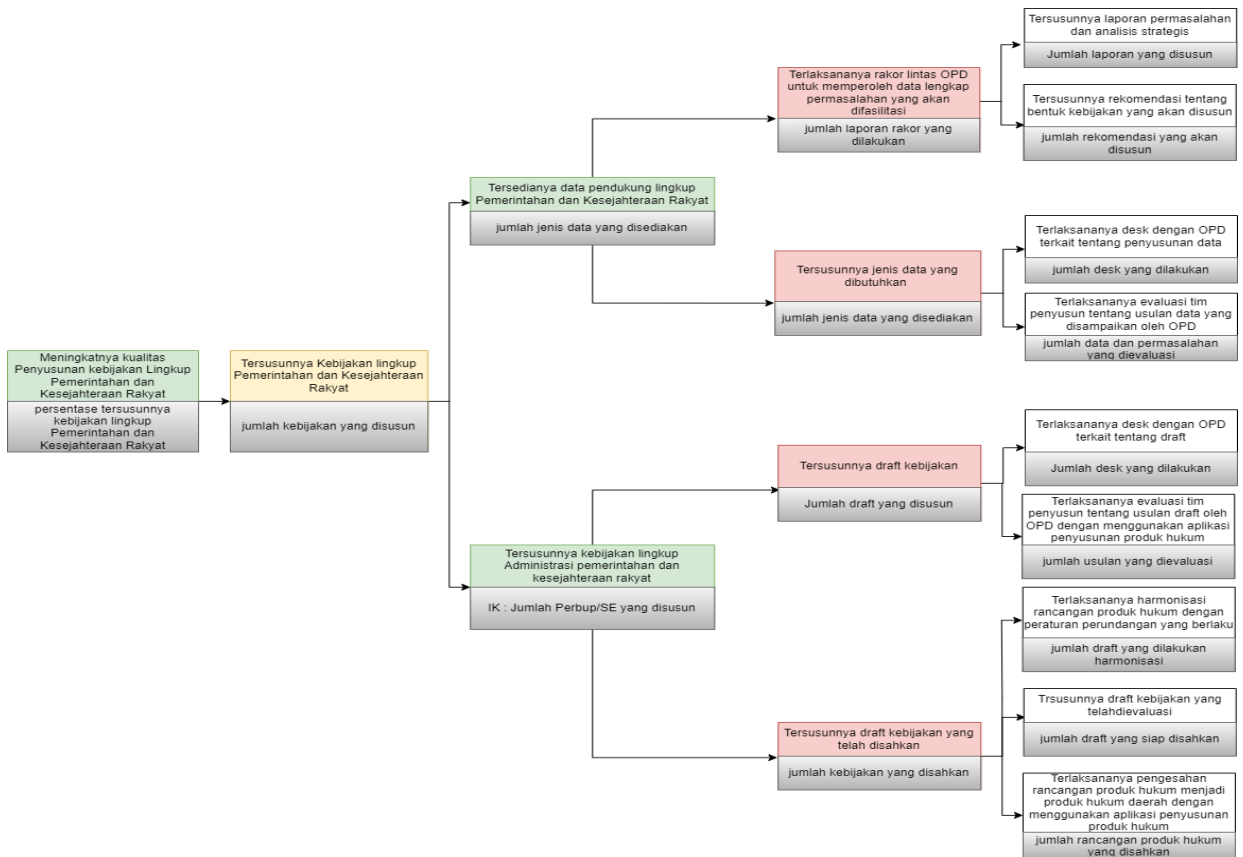
Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (*logic model*) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan.

Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dapat dijabarkan sebagai berikut :

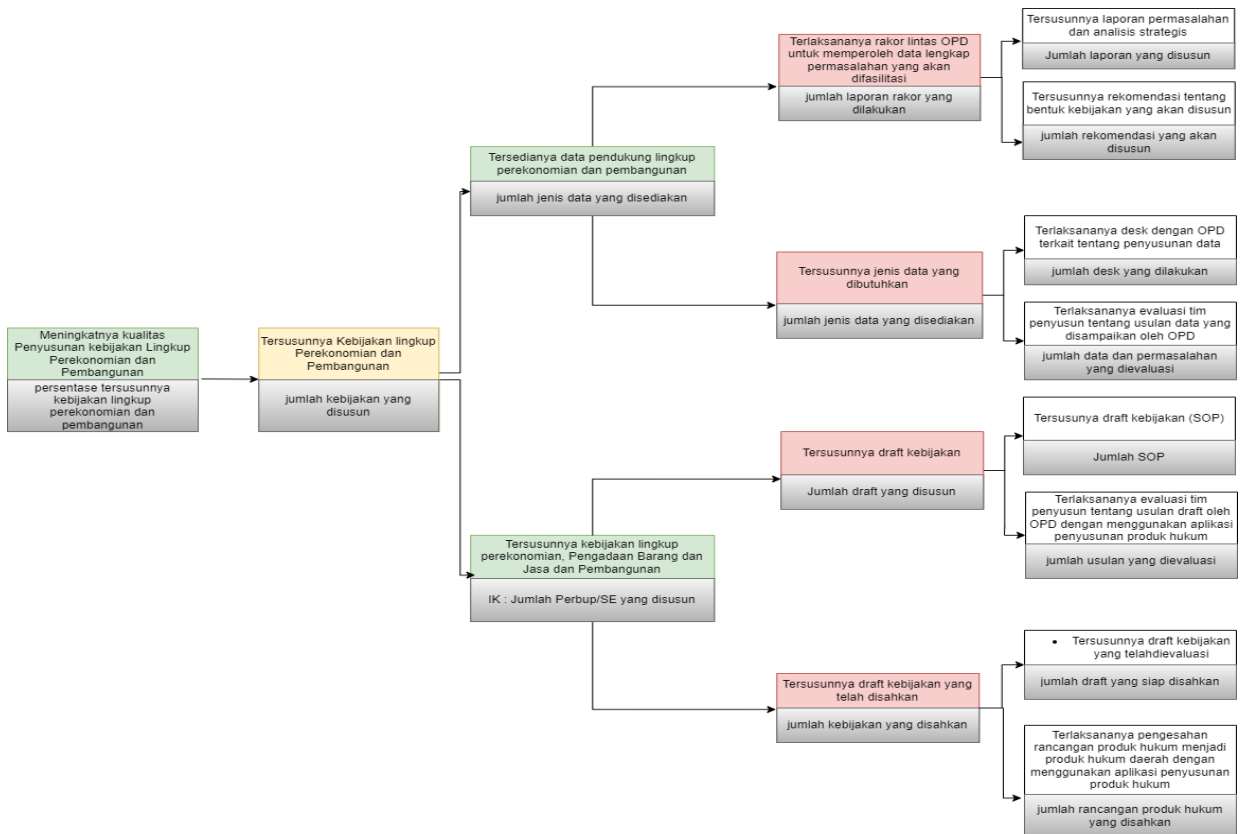
RINGKASAN POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH



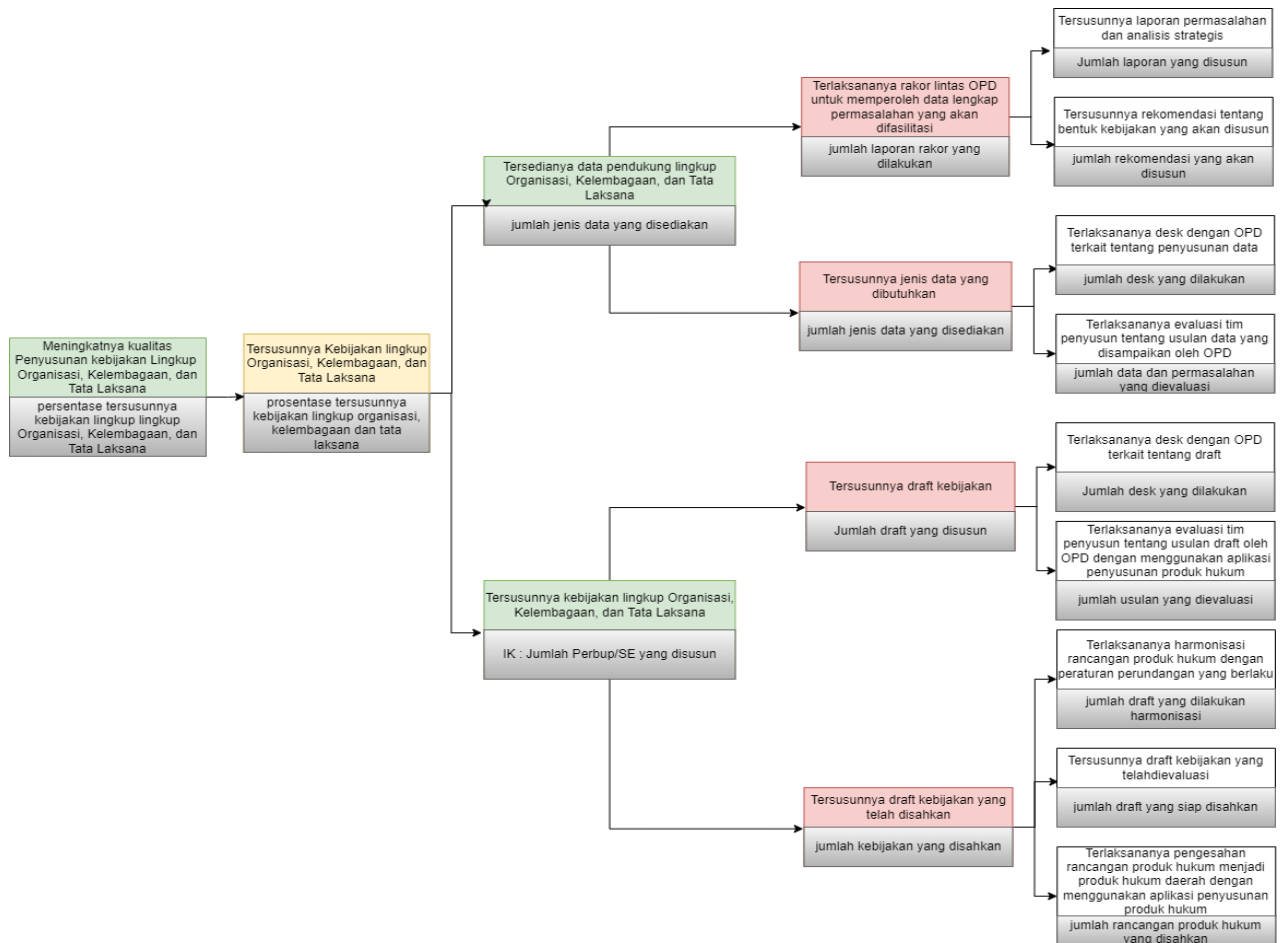
POHON KINERJA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



POHON KINERJA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



POHON KINERJA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat.

Sekretariat Daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Sekretariat Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang

bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Tahun 2023

Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	75	59,15	78,86%	Tinggi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia (LKPP)
			Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan	100%	84%	84,26%	Tinggi	Bagian Hukum
			Indeks kepatuhan layanan publik	70,95	79,75	112,40%	Sangat Tinggi	Ombusman RI
			Indeks Kelembagaan	78	75,28	96,51%	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi / Kemenpan RB
			Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi
			Nilai EKPPD	4,3	3,1798	73,95%	Sedang	Kemendagri
			Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	100%	93,82%	93,82%	Sangat Tinggi	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80%	80%	100,00%	Sangat Tinggi	Bagian protokol dan komunikasi Pimpinan
			Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Bagian Pembangunan
			Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Bagian Perekonomian dan SDA
			Nilai Sakip setda	A	A	100,00%	Sangat Tinggi	Inspektorat

1. **Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa** dari target 75 tercapai 59,15 atau tingkat capaiannya 78,86%. Capaian ini dikarenakan Nilai komponen pemanfaatan *e-purchasing* masih “0” dikarenakan Pejabat Pembuat Komitmen di perangkat Daerah belum menyelesaikan proses pengadaan melalui aplikasi sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Selain itu, pencatatan *Non e-tendering* di sistem belum dilakukan oleh sebagian besar Perangkat daerah. Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ belum memenuhi target dikarenakan total kebutuhan 22 orang fungsional PBJ masih belum terpenuhi orang fungsional PBJ. Komponen Tingkat Kematangan UKPBJ juga belum terpenuhi. Dari standar 9 komponen baru terpenuhi 8 komponen. Komponen yang belum terpenuhi SDM dan Analisis Jabatan. Ketiga komponen besar ini menyumbang nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa. Langkah-langkah perbaikan akan dilakukan pada tahun mendatang untuk sosialisasi dan pendampingan untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan khususnya kepada Pejabat pembuat Komitmen.

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
313	Kota Yogyakarta	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,40	18,67	40,00	77,07	Baik
314	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	3,71	4,80	12,18	35,56	71,97	Baik
315	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten	10,00	4,80	0,00	1,00	0,00	4,57	18,25	35,56	72,18	Baik
316	Kabupaten Sleman	Kabupaten	10,00	4,99	0,00	1,00	0,00	4,09	14,08	40,00	74,16	Baik
317	Kabupaten Bantul	Kabupaten	10,00	4,99	0,00	1,00	0,00	4,96	9,13	35,56	65,24	Cukup
318	Provinsi Jawa Timur	Provinsi	10,00	5,00	0,00	1,00	2,92	4,42	13,73	40,00	77,07	Baik
319	Kota Batu	Kota	10,00	4,72	0,00	1,00	4,27	4,84	9,00	31,11	64,94	Cukup
320	Kota Blitar	Kota	10,00	5,00	2,24	1,00	3,91	4,90	13,20	35,56	75,82	Baik
321	Kota Madiun	Kota	9,98	5,00	2,93	1,00	0,00	4,78	10,00	40,00	73,65	Baik
322	Kota Malang	Kota	10,00	4,01	0,00	1,00	0,00	4,64	22,80	35,56	78,00	Baik
323	Kota Surabaya	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	3,31	5,00	8,04	35,56	67,91	Cukup
324	Kota Mojokerto	Kota	10,00	5,00	3,02	1,00	5,00	4,38	9,38	40,00	77,76	Baik
325	Kota Kediri	Kota	9,79	5,00	0,00	1,00	3,41	4,87	23,75	35,56	83,37	Baik
326	Kota Probolinggo	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,21	22,78	31,11	79,08	Baik
327	Kota Pasuruan	Kota	10,00	4,94	2,15	0,00	0,00	4,92	12,50	26,67	61,18	Cukup
328	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten	10,00	5,00	2,93	1,00	3,78	4,87	7,09	40,00	74,45	Baik
329	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten	10,00	4,94	0,00	1,00	0,00	4,79	3,89	35,56	60,17	Cukup
330	Kabupaten Madiun	Kabupaten	9,98	4,98	0,00	0,00	3,25	4,46	7,78	40,00	70,12	Baik
331	Kabupaten Sumenep	Kabupaten	8,07	3,89	0,00	1,00	4,41	3,57	2,85	35,56	59,15	Cukup
332	Kabupaten Pacitan	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	2,91	4,88	6,52	35,56	65,67	Cukup
333	Kabupaten Jombang	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	3,94	13,13	40,00	73,07	Baik
334	Kabupaten Magetan	Kabupaten	10,00	5,00	2,80	1,00	2,85	4,47	9,43	40,00	75,15	Baik
335	Kabupaten Malang	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,92	13,09	35,56	74,57	Baik
336	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten	10,00	4,93	0,00	1,00	4,38	4,08	9,60	35,56	69,55	Cukup

Langkah-langkah perbaikan akan dilakukan pada tahun mendatang untuk sosialisasi dan pendampingan untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan khususnya kepada Pejabat pembuat Komitmen.


2. **Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan** telah mencapai 84,26 %. Semua usulan baik Peraturan daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan telah di proses sesuai dengan prosedur sebanyak 589 produk hukum. Usulan produk hukum tersebut telah direviu dan diterbitkan melalui penggunaan aplikasi Sistem Pembentukan Produk Hukum Daerah (SIBRO).
3. **Nilai Indeks kepatuhan layanan publik yang dievaluasi oleh Ombudsman RI.** Berdasarkan SK Penetapan Hasil Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor : 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, Kabupaten Sumenep untuk hasil penilaian atas standar pelayanan publik tahun 2023 yang terdiri dari : Nilai Kepatuhan; Zona Kepatuhan, Kategori dan Opini **mendapat nilai kepatuhan 79,75 dengan Zonasi Hijau, Kategori B yang berarti memiliki opini kualitas Tinggi.** Dari target sebesar 70,95 terealisasi 79,54 atau 92,58%. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan pencapaian indeks lebih tinggi terus dilakukan melalui Penyusunan kebijakan tentang pelayanana publik dan tata laksana, monitoring dan evaluasi kepada perangkat daerah penyedia layanan publik, serta pembinaan dan mengikutsertakan inovasi OPD dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Selain itu, penyusunan/pengaturan kelembagaan telah disusun dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dan dievaluasi oleh Kementerian terkait.

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
248.	Pemerintah Kabupaten Barru	80,41	Hijau	B	Kualitas Tinggi
249.	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	80,13	Hijau	B	Kualitas Tinggi
250.	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	80,11	Hijau	B	Kualitas Tinggi
251.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	80,07	Hijau	B	Kualitas Tinggi
252.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	80,06	Hijau	B	Kualitas Tinggi
253.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	79,98	Hijau	B	Kualitas Tinggi
254.	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	79,98	Hijau	B	Kualitas Tinggi
255.	Pemerintah Kabupaten Sumenep	79,75	Hijau	B	Kualitas Tinggi
256.	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	79,64	Hijau	B	Kualitas Tinggi
257.	Pemerintah Kabupaten Berau	79,57	Hijau	B	Kualitas Tinggi

Namun demikian, upaya untuk meningkatkan pencapaian indeks tersebut terus dilakukan melalui Penyusunan kebijakan tentang pelayanana publik dan tata laksana;

monitoring dan evaluasi kepada perangkat daerah penyedia layanan publik; serta pembinaan dan mengikutsertakan inovasi OPD dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Selain itu, penyusunan/pengaturan kelembagaan telah disusun dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dan dievaluasi oleh Kementerian terkait.

4. **Indeks Kelembagaan oleh Kemenpan RB tahun 2023.** Mengacu kepada Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Lembaga instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Sampai saat ini, belum ada rilis nilai indeks yang secara resmi dievaluasi/diumumkan oleh Kemenpan dan RB. Untuk penilaian mandiri sebagaimana mengacu pada Permenpan dan RB Nomor : 20 Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 22 September 2023. Hasil rata-rata penilaian mandiri evaluasi kelembagaan dari 24 perangkat daerah dengan skor 75,28 pada peringkat komposit P-4. Nilai yang didapatkan oleh perangkat daerah tersebut mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong efektif dan sangat efektif.

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Dr. Cipto No. 33 Telp. (0328) 664977 – 662610, fax. 662210
S U M E N E P
Kode Pos 69417

Sumenep, 23 September 2023

Nomor : 061/ /652. /435.032.1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Evaluasi Kelembagaan


Kepada
Yth. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
c.q. Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana
di -
JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, khususnya pada Pasal 4 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa *"Hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri"*, maka bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan Dilindungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, (laporan terlampir).

Selanjutnya, disampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan evaluasi kelembagaan, antara lain

1. Hasil Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep pada peringkat komposit P-4 dengan skor 75,28.
2. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyampaian satu set kuesioner aplikasi excel kepada masing-masing perangkat daerah.
3. Populasi dari kegiatan evaluasi kelembagaan adalah seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah sebanyak 24 perangkat daerah.
4. Responden dalam evaluasi ini adalah tim pelaksana evaluasi kelembagaan perangkat daerah tingkat perangkat daerah, sebanyak 24 tim pelaksana.
5. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 22 September 2023.

Demikian untuk menjadi maklum dan disampaikan terima kasih.


S.T. BUPATI SUMENEP
SEKRETARIS DAERAH
EDY PRASETYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680808 199003 1 014

Tembusan Yth.
Bapak Bupati Sumenep
(sebagai laporan).

5. **Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB.** tahun 2023 tercapai 100%, artinya seluruh perangkat daerah Dinas, Badan dan Kecamatan telah difasilitasi implementasi SAKIP dan RB. Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : B/390/AA.05/2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun 2023 hasil evaluasi penerapan SAKIP mendapatkan nilai 68,61 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Sedangkan sesuai dengan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 Nomor : B/273/RB.06/2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun 2023 untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan nilai 70,15 dengan predikat “BB”.

6. **Nilai EKPPD** merupakan hasil evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri. Nilai EKPPD merupakan bagian dari indikator kinerja utama dari Sekretariat Daerah yang menjadi bagian dari indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7- 6646 Tahun 2023, Hasil EKPPD Kabupaten Sumenep tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 menunjukkan skor 3,1798 dengan status sedang. Hal ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 4,3.

Upaya perbaikan terus dilakukan untuk mencapai target pada tahun berikutnya. Langkah-langkah perbaikan terus dilakukan yaitu, Sosialisasi penyusunan LPPD dari Biro Pemerintahan Pemprov setiap ada aturan yang baru. Selain itu juga Pemanfaatan aplikasi e-LPPD dalam pengumpulan data LPPD. Serta Penyusun *RoadMap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026. Selain itu, Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi telah melakukan kerja sama dengan Perguruan tinggi untuk penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi. Penyusunan ini disertai dengan sosialisasi dan diskusi dengan seluruh OPD. Upaya yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan input yang berkualitas dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

7. **Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat.** Kebijakan ini meliputi dipenuhinya atau dilaksanakannya peraturan baik dari level Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah Pusat di antaranya Petunjuk teknis hibah/ bansos, Peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan haji, penyelenggaraan diklat MTQ, serta Peraturan tentang penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan dan Peraturan tentang UKS serta kebijakan lainnya. Persentase Capaian Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat mencapai 93,82%.
8. **Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi tercapai 100%.** Capaian ini merupakan perbandingan dari Kebijakan Bidang Pembangunan yang telah disusun dengan yang seharusnya disusun. Kebijakan Bidang Pembangunan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep yang meliputi kebijakan : 1) Analisis Standar Belanja Fisik; 2) Harga Satuan Pokok Kegiatan; 3) Standar Satuan Harga Upah Tenaga Kerja dan Bahan untuk Tahun Anggaran 2024 serta 4) Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sumenep.
9. **Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan tercapai 100%.** Keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah yang melibatkan keprotokolan telah dilaksanakan sebanyak 1.016 kegiatan. Dari Jumlah Kegiatan tersebut, sebanyak 457 Kegiatan dihadiri Bupati Sumenep, sebanyak 197 Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Sumenep, sebanyak 94 Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, dan sisanya sebanyak 187 Kegiatan dihadiri oleh pejabat lainnya.
10. **Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi tercapai 100%.** Kebijakan ini meliputi dipenuhinya atau dilaksanakannya peraturan baik dari level Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah Pusat di antaranya Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Pajak Rokok, Peraturan Pemerintah mengenai Pertambangan, Konservasi/ pemanfaatan lingkungan/ SDA, Peraturan terkait Bahan Bakar Minyak, Peraturan terkait pengelolaan BUMD, Peraturan terkait inflasi daerah, serta Peraturan terkait UMKM.
11. **Nilai SAKIP Sekretariat Daerah** pada tahun 2023 adalah A (100%) dengan nilai 90 dan mencapai peringkat 1 OPD dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/331/KEP/435.013/2023 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima Reward atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah 2023.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

Nomor	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022			2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	75	43,9	58,53%	75	59,15	78,86%
			Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan	100%	100%	100,00%	100%	84%	84,26%
			Indeks kepatuhan layanan publik	70,60	65,54	92,83%	70,95	79,75	112,40%
			Indeks Kelembagaan	77	75	97,40%	78	75,28	96,51%
			Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
			Nilai EKPPD	4,2	2,80	66,67%	4,3	3,1798	73,95%
			Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	100%	100,00%	100,00%	100%	93,82%	93,82%
			Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80%	80%	100,00%	80%	80%	100,00%
			Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

			Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
			Nilai Sakip setda	A	A	100,00%	A	A	100,00%

Uraian penjelasan Tabel Perbandingan Capaian Kinerja :

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2022 dari target 75 tercapai 43,9 atau tingkat capaiannya 59%. Capaian tersebut diperoleh karena Nilai komponen pemanfaatan *e-purchasing* dan *Non-e-tendering* masih “0”. Hal itu disebabkan karena Pejabat Pembuat Komitmen di perangkat Daerah belum menyelesaikan proses pengadaan melalui aplikasi sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Selain itu, pencatatan *Non e- tendering* di sistem belum dilakukan oleh sebagian besar Perangkat daerah. Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ belum memenuhi target dikarenakan total kebutuhan 22 orang fungsional PBJ masih terpenuhi 3 orang fungsional PBJ. Komponen Tingkat Kematangan UKPBJ juga belum terpenuhi. Dari standar 9 komponen baru terpenuhi 7 komponen. Komponen yang belum terpenuhi SDM dan Analisi Jabatan. Ketiga komponen besar ini menyumbang nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa.

Pada Tahun 2023 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari target 75 tercapai 59,15 atau tingkat capaiannya 78,86%, artinya ada kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini dikarenakan salah satunya adanya komponen tingkat kematangan UKPBJ, Dari standar 9 komponen terpenuhi 8 komponen. Ketiga komponen besar ini menyumbang nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa. Langkah-langkah perbaikan akan dilakukan pada tahun mendatang untuk sosialisasi dan pendampingan untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan khususnya kepada Pejabat pembuat Komitmen.

2. Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan. Pada Tahun 2022 Capaian Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan mencapai 100%. Semua usulan baik Peraturan daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan sebanyak 623 usulan produk hukum telah direviu dan diterbitkan melalui penggunaan aplikasi Sistem Pembentukan

Produk Hukum Daerah (SIBRO). Sedangkan pada Tahun 2023 terjadi penurunan capaian hingga 84,26%. Dari Target usulan Peraturan perundang-undangan baik Peraturan daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan sebanyak 699 telah diproses sebanyak 589 produk hukum. Usulan produk hukum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan yang diajukan oleh masing-masing OPD.

3. Nilai Indeks kepatuhan layanan publik yang dievaluasi oleh Ombudsman RI.

Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor: 337 Tahun 2022 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, hasil penilaian atas standar pelayanan publik Kabupaten Sumenep tahun 2022 yang terdiri dari: Nilai Kepatuhan; Zona Kepatuhan, Kategori dan Opini **mendapat nilai kepatuhan 65, 54 dengan Zonasi Kuning, Kategori C yang berarti memiliki Opini Kualitas Sedang.** Dari target sebesar 70,60 terealisasi 65,54 atau 92,83%. Sedangkan pada Tahun 2023 Berdasarkan SK Penetapan Hasil Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor : 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, Kabupaten Sumenep untuk hasil penilaian atas standar pelayanan publik tahun 2023 yang terdiri dari : Nilai Kepatuhan; Zona Kepatuhan, Kategori dan Opini **mendapat nilai kepatuhan 79,75 dengan Zonasi Hijau, Kategori B yang berarti memiliki opini kualitas Tinggi.** Dari target sebesar 70,95 terealisasi 79,54 atau 92,58%.

4. Indeks Kelembagaan oleh Kemenpan RB tahun 2023. Mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Lembaga instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian mandiri sebagaimana mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2018 pada tahun 2022 tidak dilaksanakan, mengingat SOTK terbaru belum selesai disusun. Dengan demikian, nilai indeks kelembagaan masih sama dengan baseline 75. Pada tahun 2023 Untuk penilaian mandiri sebagaimana mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 22 September 2023. Hasil rata-rata penilaian mandiri evaluasi kelembagaan dari 24 perangkat daerah dengan skor 75,28 pada peringkat komposit P-4. Nilai yang didapatkan oleh perangkat daerah tersebut mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong efektif dan sangat efektif.

- 5. Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB.** Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB pada tahun 2022 tercapai 100%, artinya seluruh perangkat daerah Dinas, Badan dan Kecamatan telah difasilitasi implementasi SAKIP dan RB. Pada tahun 2022 hasil evaluasi penerapan SAKIP untuk Kabupaten Sumenep mendapatkan nilai 68,88 dengan predikat “B”. Sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : B/390/AA.05/2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun 2023 hasil evaluasi penerapan SAKIP mendapatkan nilai 68,61 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Sedangkan sesuai dengan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 Nomor : B/273/RB.06/2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun 2023 untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan nilai 70,15 dengan predikat “BB”.

- 6. Nilai EKPPD.** Nilai EKPPD merupakan bagian dari indikator kinerja utama dari Sekretariat Daerah yang menjadi bagian dari indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sumenep Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1109 Tahun 2023, Hasil EKPPD Kabupaten Sumenep tahun 2022 berdasarkan LPPD Tahun 2021 menunjukkan skor 2,80 dengan status sedang. Hal ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 4,2. Sedangkan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7- 6646 Tahun 2023, Hasil EKPPD Kabupaten Sumenep tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 menunjukkan skor 3,1798 dengan status sedang. Hal ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 4,3.

- 7. Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat.** Berdasarkan data realisasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang tercapai pada tahun 2022 sebesar 100% sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar 93,82%. Kebijakan ini meliputi dipenuhinya

atau dilaksanakannya peraturan baik dari level Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah Pusat di antaranya Petunjuk teknis hibah/ bansos, Peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan haji, penyelenggaraan diklat MTQ, serta Peraturan tentang penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan dan Peraturan tentang UKS serta kebijakan lainnya.

8. **Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi tercapai 100%.** Capaian ini merupakan perbandingan dari Kebijakan Bidang Pembangunan yang telah disusun dengan yang seharusnya disusun. Kebijakan Bidang Pembangunan yang telah disusun pada tahun 2022 tercapai 100 % yang meliputi Kebijakan : 1) Analisis Standar Belanja; 2) Harga Satuan Pokok Kegiatan; 3) Standar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja dan bahan. Sedangkan pada tahun 2023 Kebijakan Bidang Pembangunan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep meliputi kebijakan : 1) Analisis Standar Belanja Fisik; 2) Harga Satuan Pokok Kegiatan; 3) Standar Satuan Harga Upah Tenaga Kerja dan Bahan untuk Tahun Anggaran 2024 serta 4) Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sumenep.
9. **Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan tercapai 100%.** Pada tahun 2022 Keseluruhan kegiatan pemerintah Daerah yang melibatkan keprotokolan telah dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak 953 kali kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2023 kegiatan Pemerintah Daerah yang melibatkan keprotokolan dilaksanakan sebanyak 1.016 kegiatan. Dari Jumlah Kegiatan tersebut, sebanyak 457 Kegiatan dihadiri Bupati Sumenep, sebanyak 197 Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Sumenep, sebanyak 94 Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, dan sisanya sebanyak 187 Kegiatan dihadiri oleh pejabat lainnya.
10. **Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi tercapai 100%.** Pada tahun 2022 dan tahun 2023 Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi mencapai 100%. Kebijakan ini meliputi dipenuhinya atau dilaksanakannya peraturan baik dari level Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah Pusat di antaranya Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Pajak Rokok, Peraturan Pemerintah mengenai Pertambangan, Konservasi/ pemanfaatan lingkungan/ SDA,

Peraturan terkait Bahan Bakar Minyak, Peraturan terkait pengelolaan BUMD, Peraturan terkait inflasi daerah, serta Peraturan terkait UMKM.

11. **Nilai SAKIP Sekretariat Daerah.** Pada tahun 2022 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah tercapai A (100%) dengan nilai 89,59 dan mencapai peringkat 1 OPD pada implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/500/KEP/435.013/2022. Pada tahun 2023 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah juga A (100%) dengan nilai 90 dan mencapai peringkat 1 OPD dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/331/KEP/435.013/2023 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima Reward atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Nomor	Tujuan /Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan	
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100	
1.	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	59,15	75	78,87
			Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan	84%	100%	84,26
			Indeks kepatuhan layanan public	79,75	81	98,46
			Indeks Kelembagaan	75,28	81	92,94
			Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB	100%	100%	100,00
			Nilai EKPPD	3,1798	4,6	68,13

		Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	93,82%	100,00%	93,82
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80%	80%	100,00
		Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	100%	100%	100,00
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	100%	100%	100,00
		Nilai SAKIP Setda	A	A	100,00

Uraian penjelasan Tabel Kemajuan Capaian Kinerja Sasaran Strategis :

1. **Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa** dari target 75 pada tahun 2023 telah tercapai 59,15 atau tingkat capaiannya 78,86% hingga akhir tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Diantara upaya-upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan nilai komponen pemanfaatan *e-purchasing* yang masih “0” dikarenakan Pejabat Pembuat Komitmen di perangkat Daerah belum menyelesaikan proses pengadaan melalui aplikasi sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Selain itu, meningkatkan pencatatan *Non e-tendering* di sistem yang belum dilakukan oleh sebagian besar Perangkat daerah. Serta meningkatkan Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ yang belum memenuhi target dari total kebutuhan 22 orang fungsional PBJ masih belum terpenuhi.
2. **Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan.** Pada tahun 2023 Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan mencapai 84,26%. Dari target 699 peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan hanya terealisasi 589 produk hukum. Hal itu disebabkan penyusunan produk hukum dilakukan berdasarkan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep baik Peraturan daerah, Peraturan Bupati, maupun Surat Keputusan. Usulan produk hukum tersebut telah direviu dan diterbitkan melalui penggunaan aplikasi Sistem Pembentukan Produk Hukum Daerah (SIBRO). Jika dibandingkan dengan target akhir sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026 tingkat kemajuannya telah mencapai 84,26%.

3. **Nilai Indeks kepatuhan layanan publik yang dievaluasi oleh Ombudsman RI.** Pada Tahun 2023 Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep yang terdiri dari : Nilai Kepatuhan; Zona Kepatuhan, Kategori dan Opini **mendapat nilai kepatuhan 79,75 dengan Zonasi Hijau, Kategori B yang berarti memiliki opini kualitas Tinggi.** Jika dibandingkan dengan target akhir sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026 tingkat kemajuannya telah mencapai 98,46%.
4. **Indeks Kelembagaan oleh Kemenpan RB tahun 2023.** Pada Tahun 2023 Mengacu kepada Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 22 September 2023. Hasil rata-rata penilaian mandiri evaluasi kelembagaan dari 24 perangkat daerah dengan skor 75,28 pada peringkat komposit P-4. Nilai yang didapatkan oleh perangkat daerah tersebut mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong efektif dan sangat efektif. Jika dibandingkan dengan target akhir sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2026 tingkat kemajuannya telah mencapai 92,94% dengan target skor Indeks Kelembagaan sebesar 81 poin.
5. **Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB** tahun 2023 tercapai 100%, artinya seluruh perangkat daerah Dinas, Badan dan Kecamatan telah difasilitasi implementasi SAKIP dan RB. Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : B/390/AA.05/2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun 2023 hasil evaluasi penerapan SAKIP mendapatkan nilai 68,61 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Jika dibandingkan dengan target akhir sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2026 tingkat kemajuannya telah mencapai 100%.
6. **Nilai EKPPD.** Nilai EKPPD merupakan bagian dari indikator kinerja utama dari Sekretariat Daerah yang menjadi bagian dari indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7- 6646 Tahun 2023, Hasil EKPPD Kabupaten Sumenep tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 menunjukkan skor

3,1798 dengan status sedang. Hal ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 4,3. Jika dibandingkan dengan target akhir sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2026 dengan target nilai 4,6 maka tingkat kemajuannya mencapai 68,13%.

7. **Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat.** Pada Tahun 2023 Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat tercapai sebesar 93,82 %. Kebijakan ini mencakup dipenuhinya dan dilaksanakannya peraturan baik dari level Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah Pusat di antaranya Petunjuk teknis hibah/ bansos, Peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan haji, penyelenggaraan diklat MTQ, serta Peraturan tentang penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan dan Peraturan tentang UKS serta kebijakan lainnya. Tidak tercapainya Kebijakan ini secara 100% karena pada indikator jumlah penerima bantuan sosial dari target 1.025 orang hanya terealisasi sebanyak 962 penerima. Realisasi ini mempengaruhi Capaian persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jika dibandingkan dengan target akhir sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2026 tingkat kemajuannya telah mencapai 93,82%.
8. **Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi tercapai 100%. Capaian ini merupakan perbandingan dari** Kebijakan Bidang Pembangunan yang telah disusun dengan yang seharusnya disusun. Kebijakan Bidang Pembangunan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep yang meliputi kebijakan : 1) Analisis Standar Belanja Fisik; 2) Harga Satuan Pokok Kegiatan; 3) Standar Satuan Harga Upah Tenaga Kerja dan Bahan untuk Tahun Anggaran 2024 serta 4) Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sumenep. Jika dibandingkan dengan target akhir sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2026 tingkat kemajuannya telah sesuai yakni 100.
9. **Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan tercapai 100%.** Keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah yang melibatkan keprotokolan telah dilaksanakan sebanyak 1.016 kegiatan. Dari Jumlah Kegiatan tersebut, sebanyak 457 Kegiatan dihadiri Bupati Sumenep, sebanyak 197 Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Sumenep, sebanyak 94 Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, dan sisanya sebanyak 187 Kegiatan dihadiri oleh pejabat lainnya. Jika dibandingkan dengan target akhir sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2026 tingkat kemajuannya telah sesuai yakni 100%.
10. **Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi tercapai 100%.** Kebijakan ini meliputi dipenuhinya atau dilaksanakannya peraturan baik dari level Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah Pusat di antaranya Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Pajak Rokok, Peraturan Pemerintah mengenai Pertambangan, Konservasi/ pemanfaatan

lingkungan/ SDA, Peraturan terkait Bahan Bakar Minyak, Peraturan terkait pengelolaan BUMD, Peraturan terkait inflasi daerah, serta Peraturan terkait UMKM. Jika dibandingkan dengan target akhir sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2026 tingkat kemajuannya telah sesuai yakni 100%.

11. **Nilai SAKIP Sekretariat Daerah** pada tahun 2023 adalah A (100%) dengan nilai 90 dan mencapai peringkat 1 OPD dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/331/KEP/435.013/2023 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima Reward atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2026 tingkat kemajuannya telah sesuai yakni 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standard nasional atau Provinsi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
Sumenep lain

Nomor	Tujuan /Sasaran		Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standard Nasional / Provinsi	% Capaian
1	2		3	4	5	6 = $\frac{4}{5} \times 100$
1.	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	59,15	77,07	76,75
Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan			84%	100%	84,26	
Indeks kepatuhan layanan publik			79,75	88,81	89,81	

		Indeks Kelembagaan	75,28	81	92,94
		Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB	100%	100%	100,00
		Nilai EKPPD	3,1798	3,69	85,91
		Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	93,82%	100,00%	93,82
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80%	80%	100,00
		Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	100%	100%	100,00
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	100%	100%	100,00
		Nilai Sakip setda	A	A	100,00

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Nomor	Tujuan /Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %	Tingkat Keberhasilan	Upaya Peningkatan yang Ada (Telah dan atau akan Dilakukan)	
1.	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kaulitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	75	59,15	78,86%	Cukup Berhasil	Telah dan akan dilakukan
			Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan	100%	84%	84,26%	Cukup Berhasil	Telah dan akan dilakukan
			Indeks kepatuhan layanan publik	70,95	79,75	112,40%	Sangat Berhasil	Telah dilakukan

			Indeks Kelembagaan	78	75,28	96,51%	Berhasil	Telah dan akan dilakukan
			Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB	100%	100%	100,00%	Berhasil	Telah dan akan dilakukan
			Nilai EKPPD	4,3	3,1798	73,95%	Tidak Berhasil	Telah dan akan dilakukan
			Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	100%	93,82%	93,82%	Berhasil	Telah dan akan dilakukan
			Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80%	80%	100,00%	Berhasil	Telah dan akan dilakukan
			Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	100%	100%	100,00%		Telah dan akan dilakukan
			Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	100%	100%	100,00%		Telah dan akan dilakukan
			Nilai Sakip setda	A	A	100,00%		Telah dan akan dilakukan

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif yang telah / akan dilakukan sebagai berikut :

1. **Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.** Target Realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari target 75 tercapai 59,15 atau tingkat capaiannya mencapai 78,86% dengan kategori cukup berhasil.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

- Belum tercapainya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa ini dikarenakan Nilai komponen pemanfaatan *e-purchasing* masih “0” yang disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen di perangkat Daerah belum menyelesaikan proses pengadaan melalui aplikasi sampai dengan penilaian kinerja penyedia.
- Selain itu, pencatatan *Non e-tendering* di sistem belum dilakukan oleh sebagian besar Perangkat daerah.

b. Faktor Kebijakan

Komponen Tingkat Kematangan UKPBJ juga belum terpenuhi. Dari standar 9 komponen baru terpenuhi 8 komponen. Komponen yang belum terpenuhi SDM dan Analisa Jabatan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ belum memenuhi target dikarenakan total kebutuhan 22 orang fungsional PBJ masih belum terpenuhi orang fungsional PBJ.

d. Langkah yang dilakukan

Langkah-langkah perbaikan akan dilakukan pada tahun mendatang untuk sosialisasi dan pendampingan untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan khususnya kepada Pejabat pembuat Komitmen.

2. **Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan.** Target realisasi Nilai Penataan peraturan perundang-undangan adalah 100% dengan realisasi 84%. Sedangkan capaian kinerjanya mencapai 84,26% dengan kategori cukup berhasil.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Semua usulan baik Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan telah di proses sesuai dengan prosedur sebanyak 589 produk hukum. Belum tercapainya Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan ini dikarenakan Produk Hukum yang dihasilkan didasarkan pada usulan dari perangkat daerah.

b. Faktor Kebijakan

- Pembentukan produk hukum daerah dibuat berdasarkan kebutuhan, terkadang lebih dari satu peraturan ketika dibuat menggunakan metode omnibus. Sehingga berkurang jumlah produk hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Produk hukum direviu dan diterbitkan melalui penggunaan aplikasi Sistem Pembentukan Produk Hukum Daerah (SIBRO).

d. Langkah yang dilakukan

Langkah-langkah perbaikan akan dilakukan pada tahun mendatang dengan melakukan Program Pembentukan Peraturan Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah. Sehingga dapat melihat jumlah potensi pembentukan produk hukum dalam tahun berjalan.

3. **Nilai Indeks Kepatuhan Layanan Publik yang dievaluasi oleh Ombudsman RI.** Target Realisasi Indeks Kepatuhan Layanan Publik yang dievaluasi oleh Ombudsman RI adalah 70,95 dengan realisasi 79,75 atau tingkat capaiannya mencapai 112,40% dengan kategori sangat berhasil.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Berdasarkan SK Penetapan Hasil Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor : 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, Kabupaten Sumenep untuk hasil penilaian atas standar pelayanan publik tahun 2023 yang terdiri dari : Nilai Kepatuhan; Zona Kepatuhan, Kategori dan Opini **mendapat nilai kepatuhan 79,75 dengan Zonasi Hijau, Kategori B yang berarti memiliki opini kualitas Tinggi.**

b. Faktor Kebijakan

Untuk meningkatkan pencapaian indeks lebih tinggi terus dilakukan melalui Penyusunan kebijakan tentang pelayanan publik dan tata laksana, monitoring dan evaluasi kepada perangkat daerah penyedia layanan publik, serta pembinaan dan mengikutsertakan inovasi OPD dalam kompetisi inovasi pelayanan publik.

c. Langkah yang dilakukan

Upaya untuk meningkatkan pencapaian indeks tersebut terus dilakukan melalui Penyusunan kebijakan tentang pelayanan publik dan tata laksana; monitoring dan evaluasi kepada perangkat daerah penyedia layanan publik; serta pembinaan dan mengikutsertakan inovasi OPD dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Selain itu, penyusunan/pengaturan kelembagaan telah disusun dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dan dievaluasi oleh Kementerian terkait.

4. **Indeks Kelembagaan oleh Kemenpan RB tahun 2023.** Target Indeks kelembagaan pada Tahun 2023 adalah 78 dengan realisasi 75,28 atau tingkat capaiannya 96,51% dengan kategori berhasil.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Sampai saat ini, belum ada rilis nilai indeks yang secara resmi dievaluasi/diumumkan oleh Kemenpan dan RB. Untuk penilaian mandiri sebagaimana mengacu pada Permenpan dan RB Nomor : 20 Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 22 September 2023. Hasil rata-rata penilaian mandiri evaluasi

kelembagaan dari 24 perangkat daerah dengan skor 75,28 pada peringkat komposit P-4. Nilai yang didapatkan oleh perangkat daerah tersebut mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong efektif dan sangat efektif.

b. Faktor Kebijakan

Mengacu kepada Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Lembaga instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali

c. Langkah yang dilakukan

Langkah-langkah perbaikan akan dilakukan pada tahun mendatang utamanya terkait dengan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Pan dan RB dalam upaya melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah daerah.

5. Persentase PD yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB. Target persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 adalah 100% dengan realisasi 100% atau tingkat capaiannya 100% dengan kategori berhasil.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

- Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : B/390/AA.05/2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun 2023 hasil evaluasi penerapan SAKIP mendapatkan nilai 68,61 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
- Sedangkan sesuai dengan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 Nomor : B/273/RB.06/2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun 2023 untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan nilai 70,15 dengan predikat “BB”.

b. Langkah yang dilakukan

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada tahun mendatang adalah mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian target seluruh target kinerja dari perangkat daerah.

6. **Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).** Target Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) pada Tahun 2023 adalah 4,3 dengan realisasi 3,1798 atau tingkat capaiannya 73,95% dengan kategori Tidak Berhasil.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

- Belum tercapainya Target Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) pada Tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya data dukung dari perangkat daerah masih belum maksimal. Selain itu beberapa perangkat daerah masih menggunakan data lama dalam penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- Hasil evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nilai EKPPD merupakan bagian dari indikator kinerja utama dari Sekretariat Daerah yang menjadi bagian dari indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023, Hasil EKPPD Kabupaten Sumenep tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 menunjukkan skor 3,1798 dengan status sedang. Hal ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 4,3.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Aplikasi yang e_LPPD Sumenep yang dikelola Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah mengalami kendala pada server yang tersedia sehingga tidak mendukung kelancaran dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

c. Langkah yang dilakukan

- Langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun mendatang untuk meningkatkan nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) diantaranya dengan memberikan Indikator Kinerja Kunci kepada perangkat daerah di Kabupaten Sumenep.

Selain itu juga upaya untuk melakukan pemutakhiran Data yang akan digunakan dalam penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

- Upaya lainnya untuk perbaikan mencapai target pada tahun berikutnya dilakukan juga dengan Sosialisasi penyusunan LPPD dari Biro Pemerintahan Pemprov setiap ada aturan yang baru. Selain itu juga Pemanfaatan aplikasi e_LPPD dalam pengumpulan data LPPD. Serta Penyusun *RoadMap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026. Selain itu, Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi telah melakukan kerja sama dengan Perguruan tinggi untuk penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep. Penyusunan ini disertai dengan sosialisasi dan diskusi dengan seluruh OPD. Upaya yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan input yang berkualitas dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep dan dapat lebih baik dalam implementasinya.

7. **Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.** Target Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2023 adalah 100 %, realisasi 93,82% atau tingkat capaiannya 93,82% dengan kategori Berhasil.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

- Indikator kinerja Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual indikator Jumlah Penerima Bantuan Sosial yang semula ditargetkan 1.025 penerima terealisasi 962 penerimadari guru ngaji.
- Untuk indikator Jumlah Penerima Bantuan Lembaga Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan target 137 lembaga terealisasi 134 lembaga, diantaranya dari Lembaga Ormas keagamaan dan Ormas Kemasyarakatan, Majelis Tahlil dan Kelompok Masyarakat lainnya.
- Sedangkan Indikator Jumlah Peserta Diklat Keagamaan sebanyak 40 orang peserta sebagai Kegiatan Diklat Kafilah MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur dari Kabupaten Sumenep. Indikator Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan dengan target 11 kegiatan terealisasi secara keseluruhan, diantaranya Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) dan Kegiatan Bulan Ramadhan.

- indikator 3 fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial yaitu Sosialisasi dan Pembinaan UKS Di Kabupaten Sumenep, Rakerda UKS dan Fasilitasi Administrasi hibah dan bantuan sosial.
- indikator Jumlah Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dilakukan target tahun 2023 sebanyak 2 fasilitasi terealisasi 2 kegiatan tuntas. Fasilitasi haji dan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) terealisasi di tahun 2023.

b. Faktor Kebijakan

Kebijakan ini meliputi dipenuhinya atau dilaksanakannya peraturan baik dari level Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah Pusat di antaranya Petunjuk teknis hibah/bansos, Peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan haji, penyelenggaraan diklat MTQ, serta Peraturan tentang penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan dan Peraturan tentang UKS serta kebijakan lainnya.

c. Langkah yang dilakukan

Langkah-langkah perbaikan akan dilakukan pada tahun mendatang. secara periodik dilakukan survey ulang atas data awal untuk usulan penerima tahun yang akan datang. Hal ini telah difasilitasi dengan adanya aplikasi dan database sehingga diharapkan lebih mudah dalam *update* data ke depan.

8. Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi. Target Realisasi Persentase Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi adalah 100%, dengan realisasi 100% atau tingkat capaiannya mencapai 100% dengan kategori berhasil.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja :

- Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi dengan indikator kinerja Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan terealisasi diatas 90% yaitu Jumlah Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran OPD dari target 4 laporan terealisasi 4 laporan dengan Jumlah Pelaksanaan TEPR4 4 kali selama tahun anggaran.
- Indikator kinerja Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan tercapai 133,33% untuk target 3 Dokumen Program Pembanguna terealisasi 4 dokumen. Kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun yakni : 1) Peraturan Bupati Sumenep tentang Harga

Satuan Pokok Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024; 2) Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja; 3) Standar Satuan Harga Upah Tenaga Kerja dan Bahan; 4) Analisis Standar Belanja Fisik.

- indikator Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan tercapai 100% yakni 1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah tersusun sebanyak 2 laporan yaitu Laporan Pemantauan Proyek Strategis wilayah daratan dan laporan pemantauan proyek strategis wilayah kepulauan; 2) Jumlah waktu pelaksanaan Monitoring dan pelaporan Pelaksanaan Proyek-Proyek pembangunan Strategis tercapai 100%.
- indikator Kinerja Jumlah Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran OPD tercapai 100%. Laporan ini berupa laporan hasil TEPRAs yang dilaksanakan 4 kali dalam satu tahun anggaran dan permintaan data realisasi tiap akhir triwulan untuk melakukan kontrol terhadap anggaran kas yang ditetapkan dengan realisasi. Selain itu, hambatan dan kendala dapat diinventarisir dengan baik.

b. Faktor Faktor Kebijakan :

Capaian ini merupakan perbandingan dari Kebijakan Bidang Pembangunan yang telah disusun dengan yang seharusnya disusun. Kebijakan Bidang Pembangunan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep yang meliputi kebijakan : 1) Analisis Standar Belanja Fisik; 2) Harga Satuan Pokok Kegiatan; 3) Standar Satuan Harga Upah Tenaga Kerja dan Bahan untuk Tahun Anggaran 2024 serta 4) Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sumenep.

c. Langkah yang dilakukan :

- Permasalahan yang ada pada pelaksanaan program adalah pengumpulan data dari OPD membutuhkan waktu lebih lama dan Penyusunan standar membutuhkan analisis yang tepat. Berkaitan dengan hal ini Bagian pembangunan melakukan klarifikasi ke OPD yang bersangkutan dan dibahas bersama Tim penyusun Standar.
- Pada proses TEPRAs ditemui kendala penyerapan OPD yang rendah atau tidak sesuai dengan rencana anggaran kas. Terhadap situasi tersebut Bagian Pembangunan mengambil kebijakan Sanksi Keterlambatan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati

Nomer 84 Tahun 2020 tentang Sanksi keterlambatan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep.

9. **Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan.** Target Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan yang terpenuhi adalah 80%, dengan realisasi 80% atau tingkat capaiannya mencapai 100% dengan kategori berhasil.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja :

Keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah yang melibatkan keprotokolan telah dilaksanakan sebanyak 1.016 kegiatan. Dari Jumlah Kegiatan tersebut, sebanyak 457 Kegiatan dihadiri Bupati Sumenep, sebanyak 197 Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Sumenep, sebanyak 94 Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, dan sisanya sebanyak 187 Kegiatan dihadiri oleh pejabat lainnya.

b. Langkah yang dilakukan

Tingkat Kepuasan Layanan Keprotokolan terus dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan Daerah utamanya Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kompetensi ASN baik pelatihan maupun Diklat yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah dan Lembaga Profesional.

10. **Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi.** Target Realisasi Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi adalah 100% dengan realisasi 100% atau tingkat capaiannya mencapai 100% dengan kategori berhasil.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja :

- Indikator kinerja secara lebih detail terkait dengan kebijakan bidang perekonomian utamanya pada Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, target 10 laporan TPID terealisasi 5 laporan TPID (5 Laporan Pemantauan harga menjelang Ramadhan, idul fitri, idul adha, maulid nabi, dan menjelang natal dan tahun baru). Selain itu, pada pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil, Jumlah pembinaan UMKM dari target 80 kali pelaksanaan pembinaan, terealisasi sebanyak 80 kali kepada pengusaha UMKM.

- Indikator kinerja pada untuk Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yaitu Jumlah BUMD yang bina ada 5 BUMD yaitu PT. BPRS, PT. Wira Usaha Sumekar, PDAM, PT. Sumekar, PD. Sumekar terealisasi 100%. Dari jumlah laporan keuangan dan rencana kerja perusahaan (BUMD) dari target 10 Laporan terealisasi 5 laporan.
- Indikator kinerja Jumlah pembinaan, pengawasan, serta pemanfaatan Pengelolaan sumber daya pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan terealisasi secara keseluruhan, diantaranya berupa sosialisasi dana bagi hasil cukai dan monitoring dilakukan terkait harga tembakau. Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan indikator Jumlah pembinaan usaha pertambangan umum terealisasi juga secara penuh (sasaran pengusaha tambang dan monitoring selama 1 tahun terkait dengan perizinan, dampak lingkungan dan harga satuan). Selain itu untuk indikator kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air yaitu Jenis penyalur yang dimonitoring jumlah Kuota BBM, Gas, dan Energi Baru Terbarukan (SPBN, APMS, SPBU dan Agen).

b. Faktor Kebijakan

Kebijakan ini meliputi dipenuhinya atau dilaksanakannya peraturan baik dari level Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah Pusat di antaranya Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Pajak Rokok, Peraturan Pemerintah mengenai Pertambangan, Konservasi/ pemanfaatan lingkungan/ SDA, Peraturan terkait Bahan Bakar Minyak, Peraturan terkait pengelolaan BUMD, Peraturan terkait inflasi daerah, serta Peraturan terkait UMKM.

c. Langkah yang dilakukan

- Langkah yang dilakukan oleh Bagian perekonomian adalah mendesain jadwal pelaksanaan kegiatan agar efektif waktu juga sasaran kegiatan/ jumlah pelaksanaan pembinaan (jumlah kali) dapat terealisasi semaksimal mungkin. Ke depan bersama 6 OPD pembina usaha mikro dilakukan sosialisasi terkait pembiayaan KUR dan

pendataan UKM pada aplikasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan sehingga jumlah output kegiatan (baik monev KUR dan Tim Pembinaan Usaha Mikro) sehingga lebih luas cakupannya.

- Permasalahan yang ada khusus area pertambangan dan SDA rawan terhadap permasalahan (gejolak di masyarakat). Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan daerah merupakan hal yang terus ditingkatkan. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat akan dilakukan sesuai porsinya.

11. **Nilai SAKIP Sekretariat Daerah.** Target Realisasi Nilai SAKIP Sekretariat Daerah yang terpenuhi adalah A dengan realisasi A atau tingkat capaiannya mencapai 100% dengan kategori berhasil.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja :

Pada tahun 2023 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah A (100%) dengan nilai 90 dan mencapai peringkat 1 OPD dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/331/KEP/435.013/2023 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima Reward atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023.

b. Langkah yang dilakukan

Terus melakukan Koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh Bagian yang terlibat dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah utamanya di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Selain itu juga Mereviu Rencana Kerja Tahunan terkait kausalitas kinerja berdasarkan pohon kinerja hasil reviu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Sakip Setda	100,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	93,56%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100,00%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Yang disusun sesuai ketentuan	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD Yang Disusun sesuai ketentuan	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun sesuai ketentuan	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100,00%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah kali pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Keuangan Setda yang dipenuhi	100,00%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	100,00%	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Transaksi Keuangan yang terverifikasi	100,00%	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah kali Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Sinkronisasi dengan BPKAD Jumlah pelaksanaan Sinkronisasi dengan Bagian dan BPKAD	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang Disusun	100,00%	

				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prosentase Penyelesaian Administrasi Tanggapan Pemeriksaan	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	100,00%	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis yang disusun	100,00%	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi BMD setda yang dipenuhi	80,00%	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan BMD Setda	100,00%	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jenis Penatausahaan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100,00%	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	50,00%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100,00%	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00%	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan pengadministrasian Data kepegawaian di Lingkungan Setda yang dilaksanakan	100,00%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang dipenuhi	100,00%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lokasi terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	100,00%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan/ Alat untuk Kegiatan Kantor (Logistik) yang disediakan Jumlah Jenis Mamin Yang disediakan	100,00%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	100,00%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lokasi terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	100,00%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu terpenuhinya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri	100,00%	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	100,00%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Setda yang dilaksanakan	100,00%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	100,00%	

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan yang terpenuhi	100,00%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis tenaga outsourcing yang dipenuhi	100,00%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan Pemda yang dipelihara	100,00%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan (roda 4) yang dipelihara	100,00%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional (roda 4) yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional (roda 2) yang dipelihara	100,00%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah dinas	100,00%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Lokasi Gedung dan Bangunan yang terpelihara	100,00%	
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	55,56%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	100,00%	
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan atribut KDH/WKDH	100,00%	
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan medical checkup untuk KDH/WKDH	0,00%	
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	100,00%	
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggaan Setda yang difasilitasi	100,00%	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kerumahtanggaan KDH	100,00%	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kerumahtanggaan WKDH	100,00%	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tanggan Setda	100,00%	

		2. Indeks Kelembagaan	100,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% OPD yang menindaklanjuti Monev. peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja	100,00%	Menunjang
				Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi (OPD) yang dilaksanakan	100,00%	
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang disusun kebutuhan pegawai, formasi jabatan, kompetensi jabatan, kelas nilai jabatan Jumlah OPD yang akan disusun untuk di Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	100,00% 100,00%	
		3. % PD yang difasilitasi pelaksanaan SAKIP dan RB	100,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% OPD yang menindaklanjuti Monev. peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja	92,73%	Menunjang
				Penataan Organisasi	Persentase OPD yang difasilitasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	83,33%	
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kepala OPD yang difasilitasi penyusunan perjanjian kinerja dengan bupati (sesuai OPD) Jumlah kali Perjanjian kinerja Bupati dan Kepala Perangkat Daerah dibukukan Jumlah Penyusunan dokumen bahan evaluasi SAKIP Kabupaten (sesuai ketentuan Menpan) Jumlah OPD yang difasilitasi pelaksanaan peningkatan budaya kerja (sesuai jumlah OPD) Jumlah Roadmap RB dibukukan (Sesuai Jumlah OPD) Jumlah OPD menerima reward pelaksanaan SAKIP Jumlah OPD menerima reward pelaksanaan RB Jumlah OPD menerima reward peningkatan budaya kerja (sesuai OPD)	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 166,67% 100,00% 0,00% 0,00%	
		4. Indeks kepatuhan layanan publik	112,40%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana	100,00%	Menunjang
				Penataan Organisasi	Persentase OPD yang dibina yang mengikuti KIPP Persentase OPD yang dimonev kepatuhan terhadap SPP	100,00% 92,73%	
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Pedoman Penyusunan kebijakan tentang pelayanan publik dana tata laksana Jumlah OPD yang menerapkan sistem kebijakan pelayanan publik sesuai dengan prosedur Jumlah inovasi OPD yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik	100,00% 100,00% 100,00%	
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang dilakukan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	92,73%	

		5. Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	100,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Layanan Keprotokolan yang terpenuhi	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100,00%	
				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kali Kegiatan Pimpinan Daerah yang difasilitasi Keprotokolan	100,00%	
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis Fasilitasi Kegiatan Komunikasi Pimpinan Daerah yang dilakukan	100,00%	
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Pemerintahan dan Pembangunan Jumlah Layanan Iklan dan Advetorial Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100,00%	
		6. Nilai EKPPD	73,95%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan % Kerjasama Daerah yang difasilitasi	103,09% 442,86%	Menunjang
				Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Laporan PPD Kabupaten tepat waktu	103,09%	
				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah fasilitasi penataan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan	100,00%	
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan yang dibina	100,00%	
					Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pendampingan pengelolaan anggaran	100,00%	
					Jumlah Patok Batas yang akan dibangun	100,00%	
					Jumlah Kecamatan yang dibina optimalisasi pelaksanaan PATEN	100,00%	
					Jumlah Tugu Batas Kecamatan dipelihara	100,00%	
					Jumlah Pembakuan Rupa Bumi	0,00%	
				Jumlah Pembuatan Papan Nama Jalan	100,00%		
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100,00%	
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	442,86%	
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	442,86%	
		7. % Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	93,82%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	% Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	94,83%	Menunjang
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan keagamaan, Pendidikan, dan Kepemudaan, Kesehatan dan Kemasyarakatan	93,68%	
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	100,00%	
					Jumlah Penerima Bantuan Lembaga Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	89,78%	
					Jumlah Penerima Bantuan Sosial	93,85%	
					Jumlah Peserta Diklat Keagamaan	100,00%	
					Jumlah Penerima hibah uang (beasiswa santri)	0,00%	
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan	100,00%	
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dilakukan	100,00%	

		8. Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan	84,26%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	% Harmonisasi Produk Hukum Daerah	84,25%	Menunjang
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pendampingan Hukum dan Penyusunan Produk Hukum yang terselesaikan	84,25%	
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah fasilitasi Produk Hukum Daerah	84,26%	
				Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Koordiansi hukum yang dilakukan Jumlah Perkara yang ditangani	80,00%	
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Referensi Hukum	84,26%	
		9. % Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	100,00%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	% Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah % Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	55,23% 100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah yang dilaksanakan	55,23%	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dibina Jumlah laporan keuangan dan rencana kerja perusahaan	100,00% 50,00%	
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan OPD Pengguna Dana Pajak Rokok Persentase Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok Jumlah Laporan OPD Pengguna DBHCHT Jumlah Laporan TPID Jumlah operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal	0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%	
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Monev pada Pelaku Ekonomi Mikro (Pembinaan UMKM)	160,00%	
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	100,00%	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah jenis pembinaan, pengawasan, serta pemanfaatan Pengelolaan sumber daya	100,00%	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah jenis pelaksanaan pembinaan usaha pertambangan umum	100,00%	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah jenis penyalur yang dimonitoring Kuota BBM, Gas, dan Energi Baru Terbarukan	100,00%	
		10. % Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	100,00%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	% perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan	108,33%	Menunjang
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan dan data pembangunan yang disediakan	108,33%	
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan yang disusun	133,33%	

				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah jenis Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan	100,00%	
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan dan evaluasi Penyerapan Anggaran OPD (TEPRA)	100,00%	
		11. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	78,86%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan	125,20%	Menunjang
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	125,20%	
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket OPD melalui SPSE Persentase paket e-tendering dan e-purchasing terfasilitasi melalui SPSE dan Penayangan RUP oleh OPD	184,00% 117,65%	
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang terfasilitasi di LPSE Persentase Paket e-tendering dan e-purchasing yang terfasilitasi	114,00% 111,11%	
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penanganan Permasalahan pengadaan barang dan jasa	100,00%	
					Jumlah Penyusunan Kebijakan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	100,00%	
					Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang terfasilitasi Pendampingan Pengadaan Barang	100,00%	
					Jumlah Waktu Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dan Sanggah	100,00%	
					Jumlah waktu Pelayanan Konsultasi PBJ	100,00%	
RATA RATA CAPAIAN						112,04%	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor baik yang menunjang maupun yang menyebabkan terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep target kinerja **Nilai SAKIP Sekretariat Daerah, Indeks Kelembagaan, Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Indeks Layanan Kepatuhan Publik dan Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan** tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang yang tercapai.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan target kinerja **Nilai EKPPD, Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang terpenuhi, dan Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan** tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang yang tercapai.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan target kinerja **Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi, Persentase Kebijakan Bidang**

Pembangunan yang terpenuhi, dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang yang tercapai.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.392.834.553	39.311.733.537	94,97%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.643.800	23.849.750	89,51%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.455.600	5.214.900	95,59%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.198.700	3.974.900	94,67%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.926.000	3.674.150	93,59%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.699.500	4.081.800	86,86%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.495.000	2.003.750	80,31%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.179.500	3.329.800	79,67%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.689.500	1.570.450	92,95%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.809.700.508	20.306.725.018	93,11%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.754.631.808	20.254.733.568	93,11%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.610.500	17.573.600	99,79%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.206.000	6.071.400	84,25%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.663.300	10.960.100	93,97%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.918.300	3.627.900	92,59%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.496.300	9.339.850	98,35%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.174.300	4.418.600	85,40%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	123.348.900	121.617.728	98,60%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.003.300	11.909.200	99,22%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	99.356.000	97.785.610	98,42%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.989.600	11.922.918	99,44%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.524.240.020	4.454.777.535	98,46%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	233.600.000	233.515.200	99,96%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.087.015.020	1.081.563.875	99,50%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	314.605.000	303.764.325	96,55%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	88.452.000	72.090.000	81,50%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.756.869.000	2.720.844.135	98,69%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43.699.000	43.000.000	98,40%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	699.424.334	682.045.200	97,52%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	699.424.334	682.045.200	97,52%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.189.374.953	4.007.768.676	95,67%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.479.502.910	1.398.503.876	94,53%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.709.872.043	2.609.264.800	96,29%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.224.658.318	3.206.954.909	99,45%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	502.800.000	502.604.208	99,96%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	965.529.550	962.626.228	99,70%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.340.000	196.805.000	94,01%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.546.988.768	1.544.919.473	99,87%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.095.327.689	917.665.107	83,78%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	342.327.689	164.825.107	48,15%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	153.000.000	152.840.000	99,90%
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	-	0,00%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	100,00%
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.974.302.480	3.914.360.350	98,49%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	580.508.280	565.564.200	97,43%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	210.580.000	209.518.150	99,50%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.183.214.200	3.139.278.000	98,62%
	Penataan Organisasi	740.695.251	736.993.860	99,50%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	275.302.384	275.222.900	99,97%
	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	300.496.887	300.276.120	99,93%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	115.069.580	111.736.640	97,10%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49.826.400	49.758.200	99,86%

	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	786.927.800	743.394.004	94,47%
	Fasilitasi Keprotokolan	226.940.900	224.620.748	98,98%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	372.077.900	370.249.970	99,51%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	187.909.000	148.523.286	79,04%
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.246.497.102	9.708.104.256	94,75%
	Administrasi Tata Pemerintahan	1.205.840.820	1.187.960.390	98,52%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	175.092.100	174.417.775	99,61%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	360.624.020	360.100.849	99,85%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	670.124.700	653.441.766	97,51%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	63.371.200	60.970.681	96,21%
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	63.371.200	60.970.681	96,21%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.303.003.442	7.789.910.679	93,82%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.283.135.540	6.848.081.674	94,03%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	284.512.000	264.816.495	93,08%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	735.355.902	677.012.510	92,07%
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	674.281.640	669.262.506	99,26%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	299.843.460	298.498.442	99,55%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	310.069.560	306.893.204	98,98%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	64.368.620	63.870.860	99,23%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.828.476.065	1.696.978.789	92,81%
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	470.239.900	409.407.542	87,06%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	246.640.000	191.499.507	77,64%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	107.737.900	104.985.250	97,45%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	115.862.000	112.922.785	97,46%
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	849.964.125	807.865.042	95,05%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	563.159.800	556.671.210	98,85%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	204.365.425	193.603.282	94,73%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	82.438.900	57.590.550	69,86%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	264.312.900	247.779.430	93,74%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	119.590.000	107.856.138	90,19%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	53.008.900	52.771.815	99,55%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	91.714.000	87.151.477	95,03%
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	243.959.140	231.926.775	95,07%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	80.409.340	75.039.675	93,32%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	80.639.900	77.177.750	95,71%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	82.909.900	79.709.350	96,14%
RATA RATA CAPAIAN				94,88%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
	Nilai Sakip Setda	A	A	100,00%	39.865.211.502,00	37.831.345.673,00	94,90%	5,10%
	Indeks Kelembagaan	78,00%	75,28%	96,51%	275.302.384,00	275.222.900,00	99,97%	-3,46%
	% PD yang difasilitasi pelaksanaan SAKIP dan RB	100,00%	100,00%	100,00%	115.069.580,00	111.736.640,00	97,10%	2,90%
	Indeks kepatuhan layanan publik	70,95%	79,75%	112,40%	350.323.287,00	350.034.320,00	99,92%	12,48%
	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,00%	80,00%	100,00%	786.927.800,00	743.394.004,00	94,47%	5,53%
	Nilai EKPPD	4,30%	3,1798%	73,95%	1269.212.020,00	1248.931.071,00	98,40%	-24,45%
	Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan	100,00%	84,00%	84,26%	674.281.640,00	669.262.506,00	99,26%	-15,00%
	% Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	100,00%	93,82%	93,82%	8.303.003.442,00	7.789.910.679,00	93,82%	0,00%
	% Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%	714.199.040,00	641.334.317,00	89,80%	10,20%
	% Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%	849.964.125,00	807.865.042,00	95,05%	4,95%
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	75,00%	59,15%	78,86%	264.312.900,00	247.779.430,00	93,74%	-14,88%
RATA RATA CAPAIAN				94,53%			96,04%	

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep adalah **Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel dan transparan** yakni sebanyak 1 indikator tujuan Nilai Bobot Pelaporan SAKIP Kabupaten dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. **Nilai Bobot Pelaporan SAKIP Kabupaten** dengan dengan target 10,85 sedangkan realisasi 11,00 sehingga **capaian kinerja sebesar 101,38%**.

Sedangkan Sasaran strategis Sekretariat Daerah adalah **Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas / Kesesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** dengan sasaran penunjang keberhasilan dari beberapa tujuan di atas sebanyak 11 indikator Sasaran dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. **Nilai SAKIP Sekretariat Daerah** dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 94,90% atau berjumlah Rp. 37.831.345.673,00.
2. **Indeks Kelembagaan** dengan capaian kinerja sebesar 96,51% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,97% atau berjumlah Rp. 275.222.900,00.
3. **Persentase yang difasilitasi Pelaksanaan SAKIP dan RB** dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 97,10% atau berjumlah Rp. 111.736.640,00.
4. **Indeks Kepatuhan Layanan Publik** dengan capaian kinerja sebesar 112,40 % dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,92% atau berjumlah Rp. 350.034320,00.
5. **Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan** dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 94,47% atau berjumlah Rp. 743.394.004,00.
6. **Nilai EKPPD** dengan capaian kinerja sebesar 73,95% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 98,40% atau berjumlah Rp. 1.248.931071,00.
7. **Nilai Peraturan Perundang-Perundangan** dengan capaian kinerja sebesar 84,26% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,26% atau berjumlah Rp. 669.262.506,00.

8. **Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang terpenuhi** dengan capaian kinerja sebesar 93,82% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 93,82% atau berjumlah Rp. 7.789.910.679,00.
9. **Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi** dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 89,80% atau berjumlah Rp. 641.334.317,00.
10. **Persentase Kebijakan Bidang Pembangunan yang terpenuhi** dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 95,05% atau berjumlah Rp. 807.865.042,00.
11. **Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa** dengan capaian kinerja sebesar 78,86% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 93,74% atau berjumlah Rp. 247.779.430,00.

Berdasarkan data di atas rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 94,53%, sedangkan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 96,04%. Jika dilakukan perbandingan pencapaian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan anggaran tujuan sasaran yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dapat dijelaskan bahwa dari 11 Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh Sekretariat Daerah terdapat 6 Indikator Kinerja yang masuk kategori efisien dan 5 Indikator Kinerja Masuk Kategori tidak Efisien karena tingkat efisiensinya kurang dari 1 persen.

Untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis tersebut di atas, dibutuhkan beberapa program/kegiatan dengan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00%	100,00%	93,56%	41.392.834.553	39.311.733.537	94,97%	(1,04%)
		100,00%	100,00%	92,73%				
		100,00%	100,00%	83,33%				
		100,00%	100,00%	100,00%				
		100,00%	100,00%	100,00%				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	26.643.800	23.849.750	89,51%	10,49%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	21.809.700.508	20.306.725.018	93,11%	6,89%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00%	80,00%	80,00%	123.348.900	121.617.728	98,60%	(18,60%)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	198.190.500	195.581.400	98,68%	1,32%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	4.524.240.020	4.454.777.535	98,46%	1,54%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	699.424.334	682.045.200	97,52%	2,48%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	4.189.374.953	4.007.768.676	95,67%	4,33%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	3.224.658.318	3.206.954.909	99,45%	0,55%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00%	55,56%	55,56%	1.095.327.689	917.665.107	83,78%	(28,22%)
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	3.974.302.480	3.914.360.350	98,49%	1,51%
	Penataan Organisasi	100,00%	100,00%	100,00%	740.695.251	736.993.860	99,50%	94,01%
		100,00%	83,33%	83,33%				
		100,00%	100,00%	100,00%				
		100,00%	92,73%	92,73%				
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,00%	100,00%	100,00%	786.927.800	743.394.004	94,47%	5,53%

2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	97,00%	100,00%	103,09%	10.246.497.102	9.708.104.256	94,75%	86,50%
		100,00%	442,86%	442,86%				
		100,00%	84,25%	84,25%				
		100,00%	94,83%	94,83%				
	Administrasi Tata Pemerintahan	97,00%	100,00%	103,09%	1.205.840.820	1.187.960.390	98,52%	4,58%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	100,00%	442,86%	442,86%	63.371.200	60.970.681	96,21%	346,65%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100,00%	93,68%	93,68%	8.303.003.442	7.789.910.679	93,82%	(0,14%)
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100,00%	84,25%	84,25%	674.281.640	669.262.506	99,26%	(15,01%)
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100,00%	55,23%	55,23%	1.828.476.065	1.696.978.789	92,81%	2,30%
		100,00%	100,00%	100,00%				
		100,00%	108,33%	108,33%				
		100,00%	125,20%	125,20%				
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100,00%	55,23%	55,23%	470.239.900	409.407.542	87,06%	(31,83%)
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100,00%	108,33%	108,33%	849.964.125	807.865.042	95,05%	13,29%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100,00%	125,20%	125,20%	264.312.900	247.779.430	93,74%	31,45%
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100,00%	100,00%	100,00%	243.959.140	231.926.775	95,07%	4,93%
Rata-rata capaian kinerja (%)				112,04%			94,88%	

Berdasarkan Data di atas Jika dilakukan perbandingan Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kinerja **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep** dengan Indikator Program berupa Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan, Persentase OPD yang menindaklanjuti Monev. peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja, Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi, Persentase OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana, Indeks Layanan Keprotokolan yang terpenuhi tercapai 93,92% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 94,97% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar (1,04%).
2. Kinerja **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan** dengan target Program berupa Persentase indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang

dilaksanakan, Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi, Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah, dan Persentase Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi tercapai 210,07 % dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 94,75% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 86,50%.

3. Kinerja Program **Perekonomian dan Pembangunan** dengan target indikator Program berupa Persentase Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah, Persentase Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Persentase perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan, Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan tercapai 97,19 % dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 92,81% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 2,30%.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak tujuan, 1 sasaran dengan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep adalah Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan terdiri dari 13 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,0% (sangat tinggi).
- Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 5 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94,97 % (kategori tinggi).
- Sasaran Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94,75 % (kategori tinggi).
- Sasaran Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 92,81 % (kategori tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran Program tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 53.467.807.720 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 50.716.816.582, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 94,85% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 5,15%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Dr. Cipto No. 33 Telp. (0328) 664977-662610 Fax. (0328) 662610
SUMENEP

Kode Pos 69417

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 9 /KPTS/435.031/2023**

TENTANG

**TIM INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah yang optimal, perlu adanya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu membentuk Tim Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 102).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- Kedua : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :
- a. melakukan koordinasi, konsultasi dan internalisasi Renstra, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja PAK mendukung data-data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;
 - b. bertanggungjawab dan mendukung sepenuhnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. melaporkan hasil kinerja dan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 31 JAN 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumenep Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 188/ 9 /KPTS/435.031/2023
Tanggal : 31 JAN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
II.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
III.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
IV.	Anggota	a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah e. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah g. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah h. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
V.	Tim Teknis	a. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator pada Bagian Umum Sekretariat Daerah b. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah c. 1 (satu) orang staf Sub Koordinator Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah d. 1 (satu) orang staf Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**


* Ir. **EDY RASIYADI, M.Si**
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

No	Tujuan	Rencana	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE KESEKUTERA 2022		UNIT PERANGKAS DAERAH
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH			
							TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH							
				Pemertanian Kabupaten Sumber Daya Alam	Pemertanian Peltanem Kabupaten dan Peltanem Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		100%	11.557.052.700	100%	2.071.979.000	100%	2.071.979.000	100%	2.001.737.233	100%	2.092.249.204	100%	2.092.249.204	100%	2.092.249.204	ESELON III-BADIAN ESDA				
				Rendemen, Sektoren, dan Evaluasi Kabupaten Pertanian, Subsektor, Sektor, dan Peltanem	Jumlah jenis peltanem pembenihan, pembenihan, dan pembenihan Peltanem sumber daya		3	11.147.912.100	3	2.422.278.176	3	2.422.278.176	3	2.229.212.704	3	2.422.278.176	3	2.422.278.176	3	2.422.278.176					
				Rendemen, Sektoren, dan Evaluasi Kabupaten Pertanian dan Lingkungan Melayu	Jumlah jenis peltanem pembenihan usaha pembenihan umum		3	122.552.990	3	112.784.000	3	112.784.000	3	127.252.400	3	127.252.400	3	127.252.400	3	127.252.400					
				Rendemen, Sektoren, dan Evaluasi Kabupaten Energi dan Air	Jumlah jenis pengukur yang dimuntahkan (DPM, DDA, dan Energi Dan Terakumulasi)		3	222.091.000	3	122.917.120	3	122.917.120	3	122.209.228	3	122.209.228	3	122.209.228	3	122.209.228					
				Peltanem Administrasi Pembangunan	Peltanem indikator dan data pembangunan yang disediakan		100%	2.242.222.700	100%	1.749.912.000	100%	2.009.222.000	100%	2.222.994.900	100%	2.222.994.900	100%	2.222.994.900	100%	2.222.994.900	ESELON III-BADIAN Peltanem				
				Facilitas Peltanem Program Pembangunan	Jumlah Peltanem Kabupaten Peltanem Pembangunan yang diukur		3	371.471.900	3	222.000.000	3	222.000.000	3	279.222.000	3	279.222.000	3	279.222.000	3	279.222.000	Peltanem Sarana dan Sektoren				
				Peltanem dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah jenis monitoring dan evaluasi Peltanem pembangunan yang dilaksanakan		3	1.272.272.000	3	1.142.080.000	3	1.142.080.000	3	1.222.742.000	3	1.222.742.000	3	1.222.742.000	3	1.222.742.000	Peltanem Indikator				
				Peltanem Evaluasi dan Peltanem Peltanem Pembangunan	Jumlah laporan dan evaluasi Peltanem Anggaran DPM (DPM)		12	92.922.000	12	82.922.000	12	82.922.000	12	92.922.000	12	92.922.000	12	92.922.000	12	92.922.000	Peltanem Peltanem				
				Peltanem Peltanem Daerah dan Jasa	Peltanem Peltanem Sistem Peltanem Daerah dan Jasa Daerah Elektronik		100%	212.122.700	100%	212.922.220	100%	212.922.220	100%	222.422.922	100%	222.422.922	100%	222.422.922	100%	222.422.922	ESELON III-BADIAN Peltanem				
				Peltanem Peltanem Daerah dan Jasa	Jumlah peltanem DPM melalui DPM		72	122.622.000	72	82.422.000	72	82.422.000	72	122.122.422	72	122.122.422	72	122.122.422	72	122.122.422	ESELON III-BADIAN Peltanem				
				Peltanem Peltanem Daerah dan Jasa	Peltanem peltanem monitoring dan evaluasi peltanem melalui DPM dan Peltanem DPM		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%						
				Peltanem Peltanem Daerah dan Jasa	Jumlah Peltanem Daerah (DPM) yang dilaksanakan di DPM		20	22.212.120	20	72.622.220	20	72.622.220	20	22.922.222	20	22.922.222	20	22.922.222	20	22.922.222					
				Peltanem Peltanem Daerah dan Jasa	Peltanem Peltanem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan		20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%						
				Peltanem dan Administrasi Peltanem Daerah dan Jasa	Jumlah laporan Peltanem Peltanem, pembenihan, pembenihan dan peltanem dan Jasa		1	22.222.240	1	67.112.000	1	67.112.000	1	21.222.000	1	21.222.000	1	21.222.000	1	21.222.000					
					Jumlah Peltanem Kabupaten Administrasi Peltanem Daerah dan Jasa		1		1		1		1		1		1		1						
					Jumlah Peltanem Daerah (DPM) yang dilaksanakan Peltanem Daerah		20		20		20		20		20		20		20						
					Jumlah Waktu Peltanem Peltanem Peltanem dan Peltanem		12		12		12		12		12		12		12						
					Jumlah waktu Peltanem Peltanem Peltanem		12		12		12		12		12		12		12						
				4.01.01 PROGRAM PERUSAHAAN DAERAH PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peltanem laporan administrasi yang lengkap dan terakumulasi peltanem peltanem daerah yang disediakan		100%	22.122.220.220	100%	22.222.222.222	100%	22.122.122.222	100%	22.222.222.222	100%	22.222.222.222	100%	22.222.222.222	100%	22.222.222.222	Eselon II				
					Peltanem Peltanem Peltanem Daerah yang Terakumulasi Tepat Peltanem		100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	Eselon II				
					Peltanem DPM yang dilaksanakan Peltanem, peltanem Peltanem Peltanem dan Peltanem		100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	Eselon II				
					Peltanem DPM yang diklasifikasi untuk memenuhi standar peltanem peltanem dan peltanem		100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	Eselon II				
					Peltanem Peltanem Peltanem yang lengkap		100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	100%	22.222.222	Eselon II				

No	Tajuan	Rencana	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE KENYATA 2020		UNIT PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET CAPAIAN	JUMLAH	
							TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH			
				Pemenuhan, Penganggaran, dan Disialasi Kinerja Penangkil Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan, Penganggaran, dan Disialasi Kinerja Penangkil Daerah yang diselesaikan	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Penyusunan Dokumen Pemenuhan Penangkil Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan dan kinerja yang diselesaikan sesuai ketentuan	3	11.812.000	3	9.092.000	4	9.092.000	4	9.092.000	4	9.092.000	4	9.092.000	4	9.092.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen RKA-SPKD	Jumlah Dokumen RKA yang diselesaikan	1	11.612.000	1	9.310.000	1	9.310.000	1	9.310.000	1	9.310.000	1	9.310.000	1	9.310.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SPKD	Jumlah Dokumen RKA-SPKD yang diselesaikan sesuai ketentuan	1	11.124.700	1	9.729.000	1	9.729.000	1	9.729.000	1	9.729.000	1	9.729.000	1	9.729.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Kelembagaan dan Penyusunan RKA-SPKD	Jumlah RKA-SPKD yang diselesaikan sesuai ketentuan	1	7.302.000	1	3.022.000	1	3.022.000	1	3.022.000	1	3.022.000	1	3.022.000	1	3.022.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Kelembagaan dan Penyusunan Perubahan RKA-SPKD yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SPKD yang diselesaikan sesuai ketentuan	1	9.319.000	1	3.902.000	1	3.902.000	1	3.902.000	1	3.902.000	1	3.902.000	1	3.902.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Sajian Kinerja dan Disialasi Realisasi Kinerja SPKD	Jumlah laporan kinerja dan disialasi realisasi kinerja yang diselesaikan sesuai ketentuan	1	19.618.000	2	9.022.000	2	9.022.000	2	9.022.000	2	9.022.000	2	9.022.000	2	9.022.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Disialasi Kinerja Penangkil Daerah	Jumlah hasil pelaksanaan evaluasi kinerja penangkil daerah	0	-	6	3.492.000	6	3.492.000	6	3.492.000	6	3.492.000	6	3.492.000	6	3.492.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Administrasi Keuangan Penangkil Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan DMD yang diproses	100%	21.226.187.992	100%	18.122.422.000	100%	18.122.422.000	100%	18.122.422.000	100%	18.122.422.000	100%	18.122.422.000	100%	18.122.422.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Pemilihan Dap dan Turunpin ASN	Jumlah ASN yang diterima/gaji ASN di kabupaten	200	21.220.992.972	210	18.097.421.212	210	18.097.421.212	210	18.097.421.212	210	18.097.421.212	210	18.097.421.212	210	18.097.421.212	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Pelaksanaan Pemenuhan dan Penguatan/Verifikasi Anggaran SPKD	Jumlah Dokumen Transaksi Anggaran yang berwujud/terverifikasi	2000	20.819.000	2000	18.424.012	2000	18.424.012	2000	18.424.012	2000	18.424.012	2000	18.424.012	2000	18.424.012	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Pelaksanaan Abstraksi SPKD	Jumlah Pelaksanaan Abstraksi SPKD dan Sinkronisasi dengan RGDAS	12	7.212.700	12	7.212.000	12	7.212.000	12	7.212.000	12	7.212.000	12	7.212.000	12	7.212.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD	Jumlah hasil pelaksanaan Sinkronisasi dengan Dap dan RGDAS	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang diselesaikan	1	11.729.000	1	11.729.000	1	11.729.000	1	11.729.000	1	11.729.000	1	11.729.000	1	11.729.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Pengalokasian dan Penyajian Dana Tanggapan Pemulihan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tanggapan Pemulihan	72%	6.027.000	72%	3.922.428	72%	3.922.428	72%	3.922.428	72%	3.922.428	72%	3.922.428	72%	3.922.428	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SPKD	Persentase laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang diselesaikan	100%	11.182.428	100%	9.200.000	100%	9.200.000	100%	9.200.000	100%	9.200.000	100%	9.200.000	100%	9.200.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Disialasi Anggaran	Jumlah Laporan Program yang diselesaikan	1	9.027.000	1	3.181.000	1	3.181.000	1	3.181.000	1	3.181.000	1	3.181.000	1	3.181.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Penangkil Daerah	Persentase laporan administrasi BMMD saldo yang diproses	100%	59.658.000	100%	50.222.000	100%	50.222.000	100%	50.222.000	100%	50.222.000	100%	50.222.000	100%	50.222.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Penyusunan Pemenuhan Rekrutmen Barang Milik Daerah SPKD	Jumlah Dokumen DMD Dibutuhkan	1	12.010.000	1	9.209.609	1	9.209.609	1	9.209.609	1	9.209.609	1	9.209.609	1	9.209.609	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SPKD	Jenis Pemenuhan Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	2	64.426.000	2	20.280.427	2	20.280.427	2	20.280.427	2	20.280.427	2	20.280.427	2	20.280.427	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Disialasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD	Jumlah Laporan Awal yang diselesaikan	3	12.010.000	3	9.972.168	3	9.972.168	3	9.972.168	3	9.972.168	3	9.972.168	3	9.972.168	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Administrasi Pengawasan Penangkil Daerah	Persentase laporan administrasi pengawasan yang dilaksanakan	100%	9.217.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Pengadaan Pakaian Dinas Daerah Akibat Kelangkaannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	0	-	0	-	200	200.000.000	0	-	200	200.000.000	0	-	200	200.000.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Pendataan dan Pengalokasian Administrasi Pengawasan	Jumlah laporan pengalokasian data pengawasan di lingkungan DMD yang dilaksanakan	2	9.217.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Administrasi Umum Penangkil Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang diproses	100%	2.222.000.000	100%	2.009.917.000	100%	2.009.917.000	100%	2.009.917.000	100%	2.009.917.000	100%	2.009.917.000	100%	2.009.917.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Penyediaan Kampas Instalasi Listrik-Pemenuhan Dengan RABMD	Jumlah telah terpasangnya tabung pemenuhan instalasi listrik	2	222.482.247	2	222.482.247	2	222.482.247	2	222.482.247	2	222.482.247	2	222.482.247	2	222.482.247	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan/ Alat untuk kegiatan Kantor Logistik yang disediakan	10	222.971.000	10	712.229.000	10	712.229.000	10	712.229.000	10	712.229.000	10	712.229.000	10	712.229.000	SEBELUM III-BAGIAN USMIS	

No	Tujuan	Rencana	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Bala Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												MONDOKI KIBERKA PADA ANMUK PERIODE KENYATA 2020		UNIT PERANGGUBUD JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET CAPAIAN	JUMLAH	
							TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH			
					Jumlah Jenis Mamin Yang MBB/BB/BS	2		2		2		2		2		2		2	ESELOK III-BAGIAN UTARA		
				Penyediaan Barang Dataran dan Pengadaan	Jumlah jenis barang mamin yang disediakan	4	376.194.533	4	376.194.533	4	376.194.533	4	376.194.533	4	376.194.533	4	376.194.533	4	376.194.533	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
					Jumlah Pengadaan yang disediakan	208.204		208.204		208.204		208.204		208.204		208.204		208.204	ESELOK III-BAGIAN UTARA		
				Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perikanan	Jumlah jenis perlengkapan kebutuhan Bahan Baku dan Peralatan Perikanan/Umbaran	3	104.394.500	3	93.393.917	3	93.393.917	3	93.393.917	3	93.393.917	3	93.393.917	3	93.393.917	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sektoral IKFP	Jumlah waktu penyelenggaraan kegiatan Kapasitas Kelembagaan dan Sektoral Dalam dan Luar Daerah yang diselenggarakan	12	1.933.330.000	12	1.612.333.433	12	1.612.333.433	12	1.971.539.306	12	1.971.539.306	12	1.971.539.306	12	1.971.539.306	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Pemeliharaan Asep Dinamis pada IKFP	Jumlah yang yang dikelembagaan (an)	20	27.049.000	20	104.103.074	20	104.103.074	24	104.103.074	24	104.103.074	24	104.103.074	24	104.103.074	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Pengadaan Barang Tidak Daerah Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BIDD Perujung Bada yang dilaksanakan	100%	3.041.370.333	100%	192.103.074	100%	192.103.074	100%	192.103.074	100%	004.103.911	100%	1.370.333.333	100%	1.370.333.333	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Pengadaan Kandang Perikanan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	Jumlah Kandang Dinas yang dibuat	6	1.908.300.000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Pengadaan Kandang Perikanan Dinas atau Kandang Dinas Operasional	Jumlah Kandang Dinas yang dibuat	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Pengadaan Fasilitas dan Sisa Lainya	Jumlah Fasilitas dan Sisa yang dibuat	100	1.073.770.333	100	192.103.074	100	192.103.074	100	192.103.074	100	004.103.911	100	1.370.333.333	100	1.370.333.333	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Penyediaan Jasa Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan jasa Perujung Urusan Felda yang disediakan	100%	3.428.663.733	100%	3.449.333.333	100%	3.449.333.333	100%	3.449.333.333	100%	3.449.333.333	100%	3.449.333.333	100%	3.449.333.333	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan yang terpenuhi	6	1.373.079.533	6	1.373.079.533	6	1.373.079.533	6	1.373.079.533	6	1.373.079.533	6	1.373.079.533	6	1.373.079.533	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis tenaga outsourcing yang dipenuhi	0	3.073.042.018	0	3.073.042.018	0	3.073.042.018	0	3.073.042.018	0	3.073.042.018	0	3.073.042.018	0	3.073.042.018	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Pemeliharaan Barang Tidak Daerah Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BIDD perujung urusan Felda yang dipelihara	100%	3.208.138.097	100%	2.123.339.730	100%	2.123.339.730	100%	2.123.339.730	100%	2.123.339.730	100%	2.123.339.730	100%	2.123.339.730	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Slaya Pemeliharaan dan Pajit Kandang Perikanan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	Jumlah kandang dinas jabatan (saya <) yang dipelihara	6	613.337.061	6	613.337.061	6	613.337.061	6	613.337.061	6	613.337.061	6	613.337.061	6	613.337.061	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Slaya Pemeliharaan, Pajit, dan Peralatan Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kandang dinas operasional (saya <) yang dipelihara	21	946.719.301	21	946.719.301	21	946.719.301	21	946.719.301	21	946.719.301	21	946.719.301	21	946.719.301	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
					Jumlah kandang dinas operasional (saya <) yang dipelihara	6		6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Pemeliharaan Fasilitas dan Sisa Lainya	Jumlah Sisa yang selenggara pemeliharaan dan peruntukan bandar	12	107.374.000	12	93.212.779	12	93.212.779	12	93.212.779	12	93.212.779	12	93.212.779	12	93.212.779	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
					Jumlah Sisa yang selenggara pemeliharaan dan peruntukan rumah dinas	12		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Lebat, Gedung dan Bangunan yang selenggara	3	593.309.749	3	593.309.749	3	593.309.749	3	593.309.749	3	593.309.749	3	593.309.749	3	593.309.749	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100%	1.337.610.000	100%	993.093.030	100%	993.093.030	100%	993.093.030	100%	993.093.030	100%	993.093.030	100%	993.093.030	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Penyediaan Day dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Sisa Day dan Tunjangan JSDI/ WSDIV	12	320.610.000	12	291.621.329	12	291.621.329	12	291.621.329	12	291.621.329	12	291.621.329	12	291.621.329	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Penyediaan Pabean Dinas dan Hibah Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pengadaan jabatan dinas dan hibah JSDI/ WSDIV	24	171.000.000	24	123.793.039	24	123.793.039	24	123.793.039	24	123.793.039	24	123.793.039	24	123.793.039	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Pelaksanaan Medikal Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Sisa selenggara kebutuhan medikal check up JSDI/ WSDIV	12	100.000.000	12	93.211.120	12	93.211.120	12	93.211.120	12	93.211.120	12	93.211.120	12	93.211.120	ESELOK III-BAGIAN UTARA	
				Penyediaan Dana Perujung Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Sisa perujudan Dana Perujung Operasional JSDI/ WSDIV	12	500.000.000	12	493.300.999	12	493.300.999	12	493.300.999	12	493.300.999	12	493.300.999	12	493.300.999	ESELOK III-BAGIAN UTARA	

No	Tujuan	Batasan	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Date Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE KENSTRAS 2020		UNIT PERANGKUNG JAWAB		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			TARGET CAPAIAN	JUMLAH
							TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH	TARGET CAPAIAN	JUMLAH			
				Pendahuluan Tugas Pimpinan	Jumlah Delapan: Pemerintahan dan Pembangunan Daerah		2	273.700.700	2	166.100.931	2	166.100.931	2	166.100.931	2	166.100.931	2	166.100.931	2	166.100.931	
					Jumlah Delapan: Pemerintahan dan Pembangunan Daerah		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LAMPIRAN SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Dr. Cipto No. 33 Telp. (0328) 664977-662610 Fax. (0328) 662610
SUMENEP

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188 / 13 / KPTS/ 435.031 / 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP.

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dan merupakan acuan yang digunakan untuk menetapkan Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Kedua : Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Sumenep.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 02 MAREK 2023



Ir. EDY RASIYADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

LAMPIRAN: Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumenep Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 188 / 13 /KPTS /435.031 / 2023
Tanggal: 02 MAR 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
 2. TUGAS : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif
 3. FUNGSI daerah;
 : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan
 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi kabupaten; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Tejara	Sejarah	Indikator Sejarah	Target 2023	PEMBILASAN/ FORMULASI PERUBAHAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Sistem Yang Akuntabel Dan Transparan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas / Ketersuaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Tiga Kelas Pengadaan Barang dan Jasa	75	1. Indikator Pemantauan SAP bobot 50% e-tendering 30% 2. Kualitas dan Kompetensi SDM FBU 20% 3. Tingkat Kamatangan (KPS) 40%	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP)
			Indeks Penataan Peraturan Perundang Undangan	100%	Jumlah Peraturan Daerah yang telah diuuli : Jumlah aturan dan OPD x 100%	Rogan Hukum
			Indeks Kepatuhan layanan publik	70,95	Indeks Kepatuhan layanan	Desubertmas RI
			Indeks Kelembagaan	78	Indeks Kelembagaan	Kemampuan KB
			Persentase PD yang diaktifasi pelaksanaan SAP dan RB	100%	Jumlah OPD yang diaktifasi : Jumlah OPD seluruhnya x 100%	Rogan Organisasi
			Ang (KPPD)	4,3	Skor dan Perilaian KPPD	Kemendagri
			Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	100%	Kebijakan Bidang Perencanaan dan SDA yang dilaksanakan : Kebijakan Bidang Perencanaan dan SDA yang berlaku	Rogan Kesejahteraan Rakyat
			Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolalan	80	Hasil survey kepuasan layanan keprotokolalan	Rogan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Persentase Kebijakan Bidang Pembangunan yang terpenuhi	100%	Kebijakan Bidang Pembangunan yang telah diuuli : Kebijakan Bidang Pembangunan yang seharusnya diuuli x 100%	Rogan Pembangunan
			Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan dan SDA yang terpenuhi	100%	Kebijakan Bidang Perencanaan dan SDA yang dilaksanakan : Kebijakan Bidang Perencanaan dan SDA yang berlaku x 100%	Rogan Perencanaan dan SDA
			Indeks Sisa Belanja	A	Hasil Evaluasi Sisa Belanja	Inspektoran

PERINTAH KABUPATEN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
 SEKRETARIAT DAERAH
 Ir. EDY RASİYADI, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650808 199003 1 014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. EDY RASIYADI, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian **target kinerja** tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila **target kinerja** dimaksud tidak tercapai karena **bukan faktor eksternal**, maka kami bersedia **dimutasi**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 25 Januari 2023

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

Ir. EDY RASIYADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650803 199003 1 014

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Kualitas/Keseesuaian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.1 Nilai EKPPD	43
		1.2 Nilai Penataan Peraturan Perundang Undangan	100%
		1.3 % Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat yang terpenuhi	100%
		1.4 Nilai Sakip Setda	A
		1.5 Indeks Kelembagaan	78
		1.6 % PD yang difasilitasi pelaksanaan SAKIP dan	100%
		1.7 Indeks kepatuhan layanan publik	70,95
		1.8 Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolatan	80
		1.9 % Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang terpenuhi	100%
		1.10 % Kebijakan bidang Pembangunan yang terpenuhi	100%
		1.11 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	75

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 38.999.062.640	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 8.550.716.964	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 4.908.388.785	
Jumlah Anggaran		Rp. 52.458.168.389	


 BUPATI SUMENEP
 ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Sumenep, 25 Januari 2023
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUMENEP

 Ir. EDY RASYADI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196306081990031014